

Optimisme

Jurnal bahasa, Sastra, dan Budaya

Vol. 1, No. 2, Desember 2020

(P) ISSN: 2089-0494

(O) ISSN: 2723-6706



**PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
FKIP UNDANA**

SUSUNAN REDAKSI

Pemimpin Umum

Prof. Dr. Feliks Tans

Pemimpin Redaksi

Dr. Marselus Robot, M.Si.

Sekretaris Redaksi

Dra. Karus Maria Margareta, M.Pd.

Bendahara

Yusta Roli Ramat, S.Sos., M.Hum.

Tim Editor/Penyunting

Dr. Kletus Erom, M.Hum.; Drs. Nyoman Reteg, M.Hum.;
Dra. Karus Maria Margareta, M.Pd.; Yusta Roli Ramat, S.Sos., M.Hum.;
Yandres A. Dj. Lao, S.S., M.Pd.

Desain Cover

Raymundus N. Lobo, S.T.

Distributor

Redaktur Optimisme

Publikasi

Redaktur Optimisme

Alamat Redaksi

Kantor Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra–FKIP–Undana
Jalan Adisucipto–Penfui

E-mail: marcelrob32@gmail.com

Hp.081337611442

Online: //simlitabmas.risetdikti.go.id/2.0/main.aspx

INFORMASI KONTAK

Jurusan PBS, FKIP, Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto Penfui, Kupang
NTT - 85111

Kontak Utama

Yandres Lao
Jurnal Optimisme PBS

Telepon
082237939107

yandreslao@teachers.org

Kontak Dukungan

Marsel Robot

Telepon
081337611442

marcelrob32@gmail.com

DAFTAR TILIK PENYERAHAN NASKAH

Penulis yang ingin memasukkan naskah harus memperhatikan poin-poin di bawah ini. Jika naskah tidak sesuai dengan persyaratan yang telah dicantumkan, ada kemungkinan naskah tersebut akan dikembalikan.

✓ Naskah belum pernah diterbitkan sebelumnya, dan tidak sedang dalam pertimbangan untuk diterbitkan di jurnal lain (atau sudah dijelaskan dalam Komentar kepada Editor).
✓ File naskah dalam format dokumen OpenOffice, Microsoft Word, atau RTF.
✓ Referensi yang dapat diakses online telah dituliskan URL-nya.
✓ Naskah diketik dengan teks 1 spasi; font 12; menggunakan huruf miring, bukan huruf bergaris bawah (kecuali alamat URL); dan semua ilustrasi, gambar, dan tabel diletakkan dalam teks pada tempat yang diharapkan, bukan dikelompokkan tersendiri di akhir naskah.
✓ Naskah mengikuti aturan gaya selingkung dan bibliografi yang disyaratkan dalam Panduan Penulis.

DARI REDAKSI
EDISI DESEMBER 2020

Memasuki edisi dua ini, Jurnal Optimisme tampil dengan dua wajah, yakni *offline* (tercetak) dan *online* (daring). Tampilan online sesungguhnya usaha merespon gerak-gerik kemajuan yang kian pesat. Demikian pula, pembaca sudah melakukan eksodus besar-besaran dari komunitas yang berbasis teritori ke komunitas pembaca yang bertanah air di dunia maya atau internet. Perpustakaan secara fisik perlahan ditinggalkan, sepi bagai kuburan tua. Perpustakaan era digital hanya digengam dan dapat dibaca kauan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Bayangkan, katalog buku hanya dicari antara jempol dan tombol. Diakui, keuntungan edisi online ialah: Pertama, lebih cepat sampai kepada pembaca. Kedua, lebih luas wilayah publisitasnya. Ketiga, mekanisme redaksional pun tergolong lebih mudah.

Satu lagi yang membahagiakan kita, Jurnal Optimisme telah terindeks di *Google Scholar* dengan *Platform & workflow by OJS/PKP*. Artinya, Jurnal Optimisme bermartabat secara akademik, sekaligus menjadi tantangan berat bagi awak Optimisme. Optimisme ditahbiskan menjadi jurnal internasional yang dapat diakses oleh siapa saja di seluruh dunia. Status Optimisme terindeks *Google Scholar* dan menjadi *Open Journal System* menuntut kualitas berstandar internasional.

Tutupan demikian yang kian menggiatkan awak Optimisme untuk perlahan berbenah. Pada level redaksional ditangani oleh generasi milenial yang jenial dan mempunyai kemampuan teknikal yang tinggi. Pada level, editor dan penelaah disarankan untuk menunjuk parah ahli di bidang masing-masing dan lintas universitas. Dalam konteks itulah, Jurnal Optimisme menjadi beranda ilmiah sebagai ruang rangsa untuk menyampaikan temuan penelitian dan gagasan kritis yang bermanfaat bagi masyarakat. Semacam bentuk sedekah ilmiah yang disumbangkan kepada masyarakat luas. Karena itu, kita diundang untuk menulis sebagai wujud amal ilmiah dan ilmiah amaliah. Selamat membaca.

Redaksi

Marselus Robot

DAFTAR ISI

ISI	HAL.
SUSUNAN REDAKSI	i
INFORMASI KONTAK	ii
DAFTAR TILIK PENYERAHAN NASKAH DARI REDAKSI EDISI DESEMBER 2020	iii iv
DAFTAR ISI	v
MENCARI TERJEMAHAN PAS UNTUK PROGRAM MERDEKA BELAJAR (<i>FINDING PROPER STRATEGIES TO IMPLEMENT INDEPENDENT LEARNING PROGRAM</i>) <i>Feliks Tans dan Hilda M. Nalley</i>	1 - 5
FUNGSI LEMBAGA ADAT PADA GUYUB BUDAYA TETUN DI KABUPATEN MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR <i>Simon Sabon Ola</i>	6 - 10
BENTUK DAN MAKNA MAJAS METAFORA BINATANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MANGGARAI <i>Fransiskus Bustan, Yohanis S. Sarong dan Frans Gana</i>	11- 16
MEMBACA WAJAH IBU KANDUNG DAN IBU PERTIWI DALAM FILM TANAH AIR BETA : SEBUAH KAJIAN SEMIOTIK <i>Marselus Robot</i>	17 - 22
KEKERASAN BERBASIS GENDER: TELAAH TEORITIS “KAWIN TANGKAP” DALAM BUDAYA SUMBA (NTT) <i>Guidora Julianta Kopong</i>	23 - 27



**MENCARI TERJEMAHAN PAS UNTUK PROGRAM MERDEKA BELAJAR
(FINDING PROPER STRATEGIES TO IMPLEMENT INDEPENDENT LEARNING PROGRAM)**

Feliks Tans dan Hilda M. Nalley
Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia;
Email: feliks.tans@staf.undana.ac.id

ABSTRACT

This article is related to “Independent Learning Program” proposed by the Minister of Education and Culture of Indonesia. The writers believe that the program is excellent. Yet, it is problematic because teachers do not know how to implement it. We, therefore, propose some strategies to help teachers soundly execute it. They are based on educational theories by such theorists as Heidegger (1968), Rogers (1983), Neville (1989), and Tans (2014), namely: 1) teachers have to understand their students’ talents, interests, and learning needs (BMKB); 2) schools be categorised based on their students’ BMKB; 3) school curriculum should be designed by schools; 4) teaching and learning schedule should be flexibly constructed so that each and every student has the opportunity to master any subjects/topics they are learning; and, 5) self-evaluation is implemented in such a way that students decide whether they master or fail any subjects/topics they have learned. In such a context, teaching and learning be understood in such a way that at the end they result in a passion for learning for teachers and students themselves.

Keywords: *talents, interests, learning needs, teaching, and learning*

A. PENDAHULUAN

Artikel ini berkaitan dengan “Program Merdeka Belajar” dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Secara esensial, menurut penulis, program merdeka belajar itu adalah soal kebebasan murid dalam belajar (*learning*) dan guru dalam pembelajaran (*teaching*). Tesis Mendikbud adalah kebebasan itu penting sebagai prasyarat untuk membuat aktivitas belajar dan pembelajaran menyenangkan, menjadi *passion*, dan hasil akhirnya efektif. Dengan demikian, ruang lingkup tulisan ini meliputi program tersebut dengan tesis Mendikbud tersebut sebagai fokusnya.

Dalam amatan penulis, program tersebut disambut dengan sangat antusias oleh para pendidik, tetapi mereka mengalami kesulitan untuk menerapkannya secara pas di sekolah. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengemukakan beberapa strategi yang perlu untuk membantu para pendidik menerapkan program tersebut secara tepat di sekolah sehingga tujuan mereka dalam mengajar tercapai secara efektif dalam konteks program merdeka belajar itu. Strategi tersebut dikemukakan berdasarkan teori pendidikan yang berterima secara universal yang dikemukakan oleh teoritis pendidikan seperti Heidegger (1968), Rogers (1983), Neville (1989), and Tans (2014). Dalam konteks itu, bagi penulis memahami teori pendidikan tersebut penting untuk menjamin bahwa program menteri benar secara akademis dan, karena itu, dapat dilaksanakan di sekolah.

Dengan demikian, tujuan artikel ini adalah untuk menggambarkan teori tersebut dalam tautannya dengan “Program Merdeka Belajar” sehingga para guru mampu menerjemahkan program itu secara pas di sekolah. Penerjemahan program tersebut secara pas (benar) di sekolah, bagi penulis, penting supaya tujuan program tersebut tercapai dan tidak membingungkan guru, pejabat, dan pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Esensi Belajar

Program merdeka belajar, disadari atau tidak, lahir karena aktivitas belajar dan pembelajaran di sekolah, secara umum, menyimpang secara pedagogis. Para guru memperlakukan pembelajaran sebagai sarana untuk mentransfer ilmu, keterampilan, dan nilai yang dianutnya kepada muridnya untuk dihafal. Yang menghafal paling banyak, seperti yang terlihat dari hasil Ujian Nasional (UN), dianggap sebagai yang paling cerdas.

Padahal sejak tahun 1950-an, Martin Heidegger menegaskan bahwa pembelajaran tidak punya tujuan lain selain untuk membuat murid belajar secara total hal-hal yang bermakna bagi hidupnya (1968. *What is called thinking?* New York: Harper Torchbooks). Dalam pembelajaran seperti itu, menurut Carl R. Rogers, yang dipromosikan adalah etos belajar tekun dalam diri murid (1983. *Freedom to Learn for the 80's*. New York: Merrill). Karena itu, tugas guru via pembelajaran adalah

mempermudah muridnya belajar (Bernie Neville. 1989. *Educating Psyche*. Melbourne: Collins Dove).

Sedangkan belajar sebagai dampak pembelajaran, sebagai sesuatu yang diinisiasi sendiri, dan/atau sebagai respons terhadap stimulus apa pun, dimaknai sebagai sebuah upaya murid atau siapa saja yang belajar untuk berpindah dari zona “proximal,” tanpa kemandirian dalam melakukan sesuatu, kepada zona perkembangan aktual, saat dia mampu melakukan sesuatu secara mandiri (1978. Lev S. Vygotsky. *Mind in Society*. Cambridge: Harvard University Press). Itu yang Carl R. Rogers sebut sebagai “*significant or experiential learning*” (Op.cit.: hlm. 20) yang memiliki lima elemen utama yang melekat erat pada diri orang/murid yang belajar.

Pertama, keseluruhan diri, jiwa-raga, otak, otot, dan hatinya terlibat sepenuhnya dalam peristiwa belajar itu (*self-involvement*). Dengan kata lain, dia tidak memikirkan, merasakan, dan/atau menyibukkan diri dengan hal lain selain aktivitas belajar itu sendiri. Fokusnya hanya pada apa yang dipelajari. Tidak terbagi.

Kedua, belajar diinisiasi oleh si murid (*self-initiated*). Walaupun dorongan untuk belajar bisa saja berasal dari lingkungan sosialnya, tetapi rasa ingin menemukan, mencari tahu, memperoleh, dan memahami sesuatu secara aktif berasal dari dalam dirinya sendiri.

Ketiga, sifatnya *pervasive*. Yang dipelajari seorang murid, secara mandiri atau kolektif, mengubah menjadi lebih baik seluruh sikap, tingkah laku, dan, bahkan, kepribadiannya. Demikian pun yang diajarkan kepadanya oleh gurunya atau siapa saja sesuai dengan kebutuhannya ikut serta membentuk dirinya menjadi lebih positif. Sebab dia berupaya untuk memahami apa yang diajarkan dan mempraktikkannya secara total. Jika dari gurunya, misalnya, dia belajar bahwa membuang sampah secara sembarangan adalah perilaku buruk, sampai mati dia akan membuang sampah pada tempatnya.

Keempat, seluruh aktivitas dan hasil belajar dievaluasi oleh murid itu sendiri (*self-evaluated*). Via evaluasinya dia tahu apakah kebutuhannya sudah terpenuhi atau belum; apakah dia mengarah pada jalur yang tepat atau belum; dan, apakah wilayah gelap ketidakpedulian yang dialaminya sudah tercerahkan atau belum. Lokus evaluasinya, boleh dikatakan, ada dalam diri murid.

Kelima, hakikatnya makna (*meaning*). Makna itu muncul dari kesadaran murid bahwa apa yang dipelajari menentukan masa depannya. Karena itu, dalam belajar, dia bersungguh-sungguh. Dia sadar bila menguasai materi belajarnya, dia berhasil; bila tidak, dia gagal. Karena itu, baginya tidak ada pilihan lain selain belajar secara total dan terus-menerus. Di situ lahir *passion* untuk belajar.

Dalam aktivitas belajar seperti itu, fokus belajar antara murid yang satu dengan yang lainnya bervariasi sesuai dengan Bakat, Minat, dan Kebutuhan Belajar (BMKB) mereka. Bervariasi. Tidak sama untuk semua. Tidak seragam seperti sekarang: semua anak dalam satu kelas belajar hal yang sama.

Yang secara potensial cerdas dalam berbagai bidang, tentu, boleh belajar banyak hal. Namun, pada akhirnya, seorang murid hanya boleh memilih satu atau dua bidang yang benar-benar diminati dan dibutuhkannya.

Sedangkan murid yang cerdas dalam satu atau dua bidang saja belajar satu atau dua bidang itu saja. Apakah itu bertautan dengan kompetensi kognitif atau psikomotorik atau afektif/spiritual tidak jadi soal. Sebab kecerdasan apa pun yang dimiliki seseorang, itu sudah cukup untuk menjadi bekal keberhasilannya (Bdk. Howard Gardner. 1993. *Multiple Intellegences: The Theory in Practice*. New York: Basic Books).

Belajar dengan fokus yang bervariasi seperti itu selaras dengan hasil penelitian pada beberapa dekade terakhir, yaitu bahwa keunggulan kognitif atau psikomotorik tidak harus selalu berarti sukses dalam kehidupan. Yang unggul dalam hal karakter saja, *soft skills* atau *noncognitive skills*, seperti rasa ingin tahu yang kuat, kontrol diri yang bagus, dan kemampuan yang baik dalam bergaul, juga bisa membuatnya berhasil (Paul Tough. 2012. *How children succeed*. London: Arrow Books, hlm. xx-xxi).

Itulah, antara lain, teori belajar dan pembelajaran dalam tautannya dengan kecerdasan yang memungkinkan orang sukses atau gagal setelah sekolah. Secara umum, guru dan murid kita di seluruh Indonesia, sayangnya, belum melakukan aktivitas belajar dan pembelajaran berdasarkan teori tersebut. Itu sebabnya merdeka belajar absen hampir di setiap lembaga pendidikan kita. Mendikbud, karena itu, merasa perlu menjalankan program merdeka belajar yang menurut penulis, bisa diterjemahkan secara pas di sekolah kita dengan cara berikut ini.

Menerjemahkan Merdeka Belajar

Program merdeka belajar Mendikbud, sejatinya, dapat diterjemahkan dengan beberapa cara yang selaras dengan teori belajar dan pembelajaran yang disinggung di atas. Pertama, setiap guru (sekolah) perlu memahami BMKB setiap murid di sekolahnya melalui observasi, dialog, dan studi dokumen. Berdasarkan pemahaman itu, para murid diklasifikasi menurut BMKB-nya, tingkat kemampuan, kematangan mental, dan fisiknya. Ini untuk menjamin bahwa apa pun yang dipelajarinya bermakna baginya (bdk. Carl R. Rogers, op. cit. hlm. 20).

Dalam konteks itu, para guru mengajar sesuai BMKB murid. Karena itu, mengetahui BMKB murid bertujuan untuk mengklasifikasi murid dan untuk memungkinkan guru mengajar secara relevan. Relevansi penting sebab seorang murid yang tidak punya bakat dasar bermusik, misalnya, tidak akan pernah menjadi musisi yang bagus walaupun diajarkan oleh guru musik brilian dengan RPP yang sempurna dan fasilitas belajar dan pembelajaran yang berkelas.

Sebaliknya, seorang murid yang punya bakat, minat bermusik yang kuat, dan *passion* untuk belajar secara sungguh-sungguh, pasti bisa menjadi musisi top walaupun gurunya tidak hebat; sarana dan prasarana musiknya tidak lengkap.

Kedua, sekolah diklasifikasi berdasarkan BMKB murid (bdk. Ivan Illich. 1976. *Deschooling Society*. Harmondsworth: Penguin Books). Sekolah jangan lagi diklasifikasi seperti sekarang ini, tetapi dikelompokkan menurut BMKB murid di setiap sekolah sehingga ada, misalnya, SMP Matematika, SMP Fisika, SMP Ekonomi, dan seterusnya. Jadi, yang berbakat, misalnya, dalam bidang matematika masuk SMP Matematika atau SMA Matematika (Bdk. Feliks Tans. "Menggagas Pendidikan Khas Indonesia." *Kompas Siang*, 18 November, 2014, hln. 7).

Kita berasumsi bahwa ketika seorang murid memilih salah satu dari sekolah tersebut, dia memiliki BMKB dalam bidang itu. Bidang lain, tentu, juga dipelajari, tetapi hanya untuk mendukung pilihan utamanya. Inilah yang dimaksudkan oleh John Dewey ketika mengatakan bahwa pendidikan bukan sebuah persiapan masa depan, tetapi kehidupan itu sendiri (dalam Ellwood P. Cubberley, 1948. *The History of Education*, hlm. 780-783).

Ketiga, kurikulum dirancang berdasarkan BMKB murid. Ini untuk membuat pembelajaran efektif dalam mendorong murid belajar. Karena itu, apa yang dikehendaki murid untuk dipelajari sesuai dengan BMKB-nya diajarkan oleh gurunya sampai tuntas. Dalam kondisi demikian, seorang murid pasti belajar dengan senang hati karena membutuhkan apa yang dipelajarinya. Penting dalam konteks ini bahwa kurikulum tidak disusun oleh Kemendikbud di Jakarta sebab bukan Kemendikbud yang tahu BMKB seorang murid secara rinci, tetapi gurunya. Sekolahnya.

Pengalaman hidup mendukung argumen ini. Yang ingin dipelajari seseorang secara *all out*, biasanya, sesuatu yang sesuai dengan BMKB-nya. Ini manusiawi. Seseorang yang, misalnya, berpotensi bagus dalam bermusik, logis jika dia berminat pada musik. Karena itu, ketika dia belajar musik, logis juga bila dia merasa senang. Merasa bebas. Merasa merdeka. Sebab dia tahu via musik, dia bisa menjadi musisi top. Juga bisa menjadi berkat bagi dirinya, dan melalui dia, bagi keluarga, bangsa, dan dunia. Dari mimpi seperti itu, *passion* untuk belajar bermusik secara total dari hari ke hari hadir.

Sebaliknya, jika dia, dalam contoh itu, diharuskan untuk mempelajari matematika atau apapun yang dia tahu dia tidak punya bakat untuk mendalaminya, tidak berminat, dan tidak membutuhkannya, dia akan kecewa. Galau. Cemas. Frustrasi. Baginya, semua itu menakutkan. Menjadi momok, secara sadar atau tidak, ketika belajar, secara sendiri atau kolektif, di rumah atau di sekolah dan/atau ketika berjumpa dengan pengajar mata pelajaran itu. Dalam kondisi itu, *passion* belajar lenyap. Tanpa jejak.

Murid itu pasti gagal. Sebab apa yang diajarkan kepadanya tidak pernah bisa dia mengerti. Lalu, ketika orang menganggapnya tidak laku, dia bisa saja menjadi pemberontak dengan harapan, secara sadar atau tidak, orang akan menganggapnya hebat. Dia bisa menjadi liar, suka melawan, bahkan gurunya sendiri. Tawuran antarpelajar yang sering menjadi tontonan selama ini,

kecuali pada masa karantina Covid-19 ini, berakar pada belajar dan pembelajaran yang jauh dari BMKB murid itu.

Keempat, waktu belajar dan pembelajaran diatur secara fleksibel untuk memungkinkan murid belajar secara tuntas. Selama ini, pengaturan jam belajar dan pembelajaran kaku karena begitu banyaknya mata pelajaran dan materi yang harus diajarkan dan dipelajari murid.

Dalam situasi demikian sering terjadi pembohongan. Ketika sekolah memutuskan angka Kriteria Kelulusan Minimum (KKM), misalnya 7 (dari rentangan 1-7), semua murid akan mencapai itu, walaupun kenyataannya angka KKM-nya jauh di bawah itu. Guru, dalam hal ini, menutup mata dan membungkam hati nuraninya karena dia tahu dia tidak punya waktu untuk membantu muridnya belajar secara tuntas. Seandainya punya waktu, muridnya tetap saja tidak mau belajar. Sebab dia tahu KKM-nya pasti akan terpenuhi, entah dia belajar atau tidak. Banyaknya koruptor di negeri ini lahir, antara lain, dari sekolah seperti itu.

Di lain pihak, dengan waktu belajar dan pembelajaran yang fleksibel, guru dan murid punya waktu lebih banyak untuk berdiskusi. Untuk apa? Untuk menemukan dan memecahkan masalah (*problem-posing* dan *problem-solving*), meneliti dan menemukan sesuatu, menjalankan tugas tertentu, dan/atau melakukan apa pun untuk membangun karakter keberanian, kemandirian, kecerdikan dalam membangun relasi sosial, keberadaban, kesopanan, dan kompetensi tertentu sesuai dengan BMKB-nya seperti yang dikehendaki oleh program merdeka belajar itu sendiri.

Dengan itu, harapan tinggi pada pundak *output* pendidikan kita, yaitu bahwa mereka "siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur" (dalam <https://id.m.wikipedia.org>. "*Merdeka Belajar*." Diunduh pada 2 April, 2020) pasti akan terpenuhi. Berdiskusi secara lebih leluasa, saya yakin, merupakan salah satu cara paling pas untuk menerjemahkan program merdeka belajar yang menurut Mendikbud, berarti "kemerdekaan berpikir" guru dalam bertugas (<https://www.tempo.co>. "Nadiem Makarim: Merdeka Belajar adalah Kemerdekaan Berpikir." Diunduh pada 26 April, 2020).

Dalam konteks ini, aturan yang mengharuskan guru mengajar minimal 24 jam per minggu perlu diganti. Berilah guru gaji dan tunjangan karena dia guru dan melaksanakan tugasnya dengan baik, walaupun hanya satu atau dua hal yang dia lakukan sepanjang minggu. Namun itu sangat bermakna, misalnya, berhasil mengubah seorang anak nakal menjadi santun. Itu, tentu, lebih baik daripada mengajar lebih dari 24 jam per minggu dan mendapat tunjangan sertifikasi guru, tetapi apa yang diajarkan tidak berpengaruh terhadap muridnya.

Kelima, evaluasi belajar dilakukan oleh murid dalam bentuk *self-evaluation* (Bdk. Carl R. Rogers, op. cit. hlm. 20). Evaluasi diri ini pasti bisa dilakukan karena seorang murid yang jujur tahu apakah dia mampu atau tidak dalam mengerjakan sesuatu. Dalam mata pelajaran apapun, dia tahu apa yang sudah dan belum dipahaminya.

Perihal evaluasi ini, sekolah bisa menuntun untuk menjamin bahwa evaluasinya objektif.

Evaluasi diri dengan bantuan sekolah tersebut menyangkut aspek apa saja: kognitif, psikomotorik, dan afektif. Dengan demikian, penghapusan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang diganti oleh asesmen sekolah, langkah tepat program merdeka belajar.

Sekolah kita sering mengabaikan kekuatan *self-evaluation* tersebut. Padahal sangat penting dalam keseluruhan proses seseorang menjadi sukses. Ketika evaluasi atas dirinya sendiri menunjukkan, misalnya, dia belum mampu untuk bertarung dan sukses pada kejuaraan tertentu, dia tidak akan mau bertarung, walaupun semua orang mengatakan dia sudah siap. Dia akan kembali ke tempat pelatihannya untuk berlatih secara terus menerus hingga dia merasa mampu. Orang dengan prestasi kelas dunia, sesungguhnya, lahir dari *self-evaluation* seperti itu.

Itulah beberapa cara yang dapat kita pakai untuk menerjemahkan program merdeka belajar secara pas di sekolah. Dengan cara itu, Indonesia tidak akan kekurangan SDM handal dalam berbagai bidang di masa depan. Sekolah pun tidak akan kekurangan murid karena kita punya sekita 45,3 juta jiwa anak usia SD sampai dengan SLTA (Data BPS untuk Tahun Ajaran 2017/2018) dengan beragam kecerdasan.

Di setiap provinsi setiap tahun selalu ada, tentu, anak paling cerdas dari yang paling cerdas, *the best of the best*, dalam bidang tertentu. Jika dikumpul dari 34 provinsi, kita minimal punya 34 anak paling cerdas per tahun; 340 anak per satu dekade. Jika mereka dididik dengan cara yang diusulkan di atas, dalam tempo 20-30 tahun ke depan, Indonesia akan berkelimpahan ilmuwan berkelas dunia. Demikian pun puluhan juta anak lain dengan berbagai kecerdasan unggulan lain yang dimilikinya; kita tidak akan pernah kekurangan SDM mumpuni, jika kita mendidikinya dalam alam merdeka belajar seperti yang diusulkan.

Tanpa alam belajar dan pembelajaran seperti itu, kita akan tetap seperti sekarang ini. Begitu banyak yang dipelajari, tetapi begitu banyak pula yang tidak dimengerti. Sebab lain yang dibutuhkan, lain pula yang diajarkan. Kita tidak punya fokus. *Output* pendidikan kita pun sering jauh dari harapan.

Adanya sekitar 6,82 juta tamatan lembaga pendidikan di Indonesia yang menganggur (Data BPS per 11 Agustus, 2019) dan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dengan kemampuan rendah sehingga mereka lebih banyak menjadi pekerja berkerah dekil daripada bekerah putih adalah bukti bahwa mutu pendidikan kita menyedihkan. Selain itu, yang bekerja di Indonesia sering tidak total dan cenderung egoistis seperti yang kita lihat, misalnya, dalam diri para koruptor. Saat ini, indeks persepsi korupsi Indonesia 40 (0 sangat korup s.d. 100 sangat bersih) atau ranking 85 dari 180 negara (dalam Kompas.com. "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2019 Naik Jadi 40." Diunduh pada 28 April, 2020).

Belum lagi menyangkut karakter "berbudi luhur" seperti, yang sederhana, membuang sampah atau air

limbahan rumah tangga atau perusahaan pada tempatnya. Kita masih sesuka kita. Tidak mengherankan Indonesia menjadi negara keempat terkotor di dunia (dalam *Merahputih.com*. "5 Negara Terkotor di Dunia, Nomor Empat Paling Harus Kamu Tahu." Diunduh pada 28 April, 2020).

Siapa yang membuatnya kotor? Siapa lagi kalau bukan orang terdidik. Dalam banyak hal seperti itu, pemerintah, tampaknya, tak berdaya sehingga banyak masalah tak kunjung terselesaikan. Siapa yang memerintah? Siapa lagi kalau bukan *output* pendidikan kita.

C. PENUTUP

Dengan hasil pendidikan yang relatif karut-marut seperti itu akibat, antara lain, sistem pendidikan kita yang belum sepenuhnya merdeka, kehadiran program merdeka belajar vital. Pada level paling nyata, program dengan landasan pedagogis yang kuat tersebut dapat segera dilaksanakan, yaitu: 1) penghapusan USBN dan UN; 2) penyederhanaan RPP dan penyesuaian sistem zonasi penerimaan murid baru sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Pada level yang lebih abstrak sama. Program merdeka belajar yang identik dengan kemerdekaan berpikir guru dan kemerdekaan belajar murid untuk menghasilkan *output* cerdas dan berkarakter mulia dapat diterjemahkan dengan cara, antara lain: a) belajar dan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan BMKB murid; b) lembaga pendidikan diklasifikasi sesuai BMKB murid; c) kurikulum disusun sekolah sesuai BMKB murid; d) waktu belajar dan pembelajaran diatur secara fleksibel untuk memungkinkan tuntasnya pembelajaran dan intensifnya diskusi untuk menemukan masalah dan memecahkannya di kelas atau di luar kelas; dan, e) evaluasi belajar dilakukan oleh si murid sendiri (*self-evaluation*) dengan bantuan sekolah untuk membuatnya lebih objektif.

Jika program merdeka belajar diterjemahkan seperti itu, masa depan pendidikan Indonesia pasti jaya. Sebab dia berkembang dalam roh belajar yang merdeka dalam rumah kita bersama, Pancasila. Sebuah suasana yang menumbuhkembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan karakter prima atas dasar kebebasan belajar yang melahirkan *passion* untuk belajar secara total sehingga hasilnya efektif.

Passion untuk belajar itulah yang sesungguhnya membuat setiap murid kita berilmu sehingga, moga-moga, mampu menemukan obat pembasmi Covid-19 atau penyakit apa pun pada saatnya nanti. Juga berketerampilan tinggi. Berkarakter agung. Kita bisa mengandalkan program merdeka belajar Mendikbud untuk membuat mimpi itu menjadi kenyataan.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Cubberley, E. P. 1948. *The History of Education*. Cambridge, Massachusetts: The Riverside Press.
Gardner, H. 1993. *Multiple Intellegences: The Theory in Practice*. New York: Basic Books.

- Heidegger, M. 1968. *What is Called Thinking?* New York: Harper Torchbooks.
- Illich, I. 1976. *Deschooling Society*. Harmondsworth: Penguin Books.
- Kompas. ND. “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2019 Naik Jadi 40.” Kompas.com. Diunduh pada 28 April, 2020.
- Merah Putih. ND. “5 Negara Terkotor di Dunia, Nomor Empat Paling Harus Kamu Tahu.” *Merahputih.com*. Diunduh pada 28 April, 2020.
- Neville, B. 1989. *Educating Psyche*. Melbourne: CollinsDove.
- Rogers, C. R. 1983. *Freedom to Learn for the 80's*. New York: Merrill.
- Tans, F. 2014. “Menggagas Pendidikan Khas Indonesia.” *Kompas*, 18 November, 2014, hlm. 7.
- Tempo. ND. “Nadiem Makarim: Merdeka Belajar adalah Kemerdekaan Berpikir.” <https://www.tempo.co>. Diunduh pada 26 April, 2020.
- Tough, P. 2012. *How Children Succeed*. London: Arrow Books.
- Vygotsky, L. S. 1978. *Mind in Society*. Cambridge: Harvard University Press.
- Wikipedia. ND. “Merdeka Belajar”. <https://id.m.wikipedia.org>. Diunduh pada 2 April, 2020.



FUNGSI LEMBAGA ADAT PADA GUYUB BUDAYA TETUN DI KABUPATEN MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Simon Sabon Ola
FKIP Universitas Nusa Cendana
Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
Surel: sabon_ola@yahoo.com

ABSTRACT

This article discusses the function of adat institutions in the Tetun culture mix in Malaka Regency. The function referred to is discussed in the context of tradition and its dynamics as a consequence of changes in society supporting Tetun culture. The questions that underlie this research, namely: "What are the functions of the Customary Institutions in the Tetun culture mix in Malaka Regency?" Referring to the concept of the functions and concepts of traditional institutions, and based on interviews obtained the results of the function of traditional institutions in the Tetun culture in Malaka, as follows : (1) the function of strengthening ritual actions, (2) the function and reconciliation, and (3) the ecological function. In the context of cultural dynamics, these functions experience shrinking as a result of shifts in social structure and hierarchy, dichotomous conflicts of interest between modern traditions, and the shared role of adat, religion and government.

Keywords: *traditional institutions, functions, cultural dynamics.*

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Kabupaten Malaka merupakan himpunan dari berbagai etnik yang ditandai oleh bahasa lokal dan keyakinan tradisi. Narrol, sebagaimana dikutip Liliweri (2005:9), etnik dikenal sebagai populasi yang (1) secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, (2) mempunyai nilai-nilai yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam satu bentuk budaya, (3) membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan (4) menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain. Pendapat Narrol ini menyiratkan pengertian bahwa konsep etnik setidaknya mengandung 4 hal yakni ketahanan dan pewarisan, kesadaran kolektif mengenai nilai, sarana dan sistem interaksi intraguyub, dan adanya ciri pembeda dengan guyub lain.

Kelompok etnik Tetun adalah himpunan masyarakat adat yang memiliki hak-hak untuk hidup dan dihargai dalam kerangka kebudayaan nasional. Masyarakat adat tersebut semestinya dipandang sebagai sumber daya dan potensi untuk dikembangkan dan diberdayakan agar bermanfaat bagi kesejahteraan individu-individu yang bergabung di dalamnya. Salah satu komponen penting dalam masyarakat adat adalah lembaga adat.

Keberadaan lembaga adat di Kabupaten Malaka saat ini diasumsikan telah mengalami pergeseran, bahkan tidak jarang terjadi "gesekan" dengan lembaga pemerintah dan lembaga keagamaan. Hal demikian bisa terjadi karena ketidakpedulian masyarakat adat sendiri

terhadap sistem, struktur, hubungan, dan nilai-nilai yang ada pada sebuah lembaga adat. Ketidakpedulian itu kemudian bermuara pada hilangnya nilai kebersamaan, solidaritas, dan saling menghargai, baik antarlembaga adat, antara lembaga adat dan pemerintah, maupun antara lembaga adat dengan lembaga-lembaga keagamaan, terutama gereja.

Realitas sebagaimana digambarkan di atas telah mendorong dilaksanakannya penelitian ini. Asumsi tentang kehidupan lembaga adat dalam guyub budaya Tetun bukanlah hal yang tidak berdasar. Seran (2010:30—331) berpendapat: "*Ema Tetun* pada saat ini dapatlah diklasifikasikan sebagai suatu masyarakat transisional... Dengan demikian maka dalam proses transisi masyarakat tradisional ini, sedang terjadi pergeseran orientasi nilai yang menyebabkan terjadinya suatu krisis nilai-nilai budaya dan moral..." Pernyataan ini sungguh-sungguh menantang ilmuwan sosial humaniora untuk melakukan kajian terhadap berbagai unsur kebudayaan lokal yang sarat nilai, termasuk di dalamnya kajian tentang fungsi lembaga adat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain survei. Data dikumpulkan dengan metode pengamatan dan wawancara. Pengamatan dilakukan terhadap kehidupan masyarakat pada kampung tradisi terkait dengan keberadaan lembaga adat dan fungsi-fungsinya. Sementara wawancara ditujukan kepada *mako'an* dan *Liurai*.

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Malaka dan difokuskan pada Malaka Tengah. Lokasi yang disasari ialah Desa Kletek, Bolan, dan Kamanasa.

Analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang didukung teknik *triangulasi*. Teknik ini diperlukan untuk melakukan cek-silang agar diperoleh pemaknaan yang tepat secara *etik* dan secara *emik*.

C. KAJIAN TEORITIK

Konsep Struktur dan Fungsi

Merton dalam Bouman (1982:37—38) mengatakan bahwa fungsi ialah faktor-faktor yang dapat dilihat dan membantu pemeliharaan keseluruhan struktur. Fungsi dalam konteks penelitian ini tidak hanya mengacu pada tugas dan jabatan dalam suatu organisasi, tetapi juga mengacu pada relasi fungsional antara bagian-bagian dalam konteks kesalingtergantungan demi mempertahankan keseimbangan kultural.

Masyarakat adat merupakan sebuah komunitas tradisi yang memiliki fungsi. Tentang fungsi, Merton (*ibid.*, hlm. 39) lebih lanjut mengatakan bahwa fungsi merupakan faktor-faktor yang dapat membantu pemeliharaan suatu keseluruhan struktural. Fungsi selalu berposisi dengan disfungsi, artinya sistem sosiokultural senantiasa berurusan dengan fungsi dan disfungsi.

Disfungsi dalam masyarakat adat terjadi karena sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun tidak ada parameter mengenai disfungsi, namun dengan menepi perubahan nilai yang menuju kepada degradasi nilai, maka hal tersebut dapat diinterpretasikan sebagai telah terjadinya disfungsi dalam sebuah sistem. Misalnya, nilai kebersamaan bergeser menjadi egoisme, dan nilai kerja keras berubah menjadi pola hidup instan, ataupun nilai hidup hemat berubah menjadi sikap hedonisme.

Konsep Lembaga Adat

Lembaga adat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu pranata sosial tradisi yang mengikuti aturan atau pun hukum adat. Pranata sosial tersebut di samping berwujud fisik seperti rumah-rumah adat sebagai simbol kesatuan dan penyatuan warga yang tercakup di dalamnya, juga berwujud nonfisik berupa aturan-aturan adat dan upacara adat. Rumah adat, aturan adat, dan upacara adat merupakan simbolisasi dari sistem norma masyarakat tradisi. Sistem ini merupakan karakteristik kearifan budaya lokal yang unik, artinya berbeda dengan kearifan budaya lokal pada kelompok etnik lain.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pasal 1 butir 4, yang dimaksudkan dengan Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Pengertian ini sarat dengan campur tangan pemerintah terhadap pranata budaya etnik yang bersifat terwariskan. Pengertian ini juga berimplikasi pada masuknya orang-

orang yang secara tradisi tidak memiliki kewenangan adat. Prinsip kedinamisan tidak sebangun dengan mencampuradukkan sistem dan struktur tradisi dengan sistem dan struktur modern. Kondisi ini berpotensi memberangus tatanan tradisi yang mengandung nilai-nilai luhur.

Nilai adalah muatan mental dan kognitif yang menuntun individu atau pun masyarakat di dalam berperilaku. Nilai mencakup segenap macam kebaikan (Kattsoff, 1996:327). Nilai terdapat juga pada masyarakat yang masih mempertahankan tradisi karena mereka memiliki norma-norma berdasarkan kesepakatan sebagai cermin peradaban mereka. Meskipun demikian, gerak perubahan yang terlampau cepat, disertai kegandrungan terhadap hal dan gagasan-gagasan modern, maka nilai-nilai asli dengan cepat dan mudah ditinggalkan. Bersamaan dengan itu, nilai-nilai baru juga tidak dihayati secara mendalam. Akibatnya, lahirlah kelompok masyarakat mengambang; berada di antara nilai baru dan nilai asli (lama). Kondisi ini dapat menyebabkan timbulnya *anomi*, hidup tanpa nilai karena baik nilai baru maupun nilai lama, sama-sama tidak dianut atau pun diacu.

Penelitian ini tidak bermaksud memaparkan kemengembangan itu untuk membenturkan nilai baru dan nilai lama (baca: asli). Penelitian ini bermuara pada pemberdayaan nilai-nilai lama dan asli yang dipandang relevan untuk kehidupan modern. Nilai lama dan asli yang masih relevan itu telah menyatu dan mengakar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat pada kampung-kampung tradisi di Kabupaten Malaka. Nilai yang sudah mengakar tersebut selayaknya diberdayakan agar dapat meningkatkan martabat kemanusiaan, termasuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Sehubungan dengan itu, yang dimaksudkan dengan lembaga adat bukanlah yang dibentuk (bentukan) pemerintah desa dan masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, melainkan suatu perilaku komunitas yang mapan dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian dan kajian tentang budaya Tetun (=Tetum) telah banyak dilakukan, antara lain oleh Hicks (1976), Parera (1994), Therik (2004), dan Seran (2007). Hicks dalam penelitian etnografis berjudul *Tetum Ghost and Kin*, yang kemudian diterjemahkan Penerbit Sinar Harapan dengan judul *Roh Orang Tetun di Timor Timur* membahas sebagian aspek budaya Tetun. Meskipun kajiannya tentang Tetun di Timor Timur (sekarang menjadi Negara Republik Demokratik Timor Leste), namun sebagian besar memiliki kesamaan dengan Tetun di Malaka (Timor Barat, Indonesia). Kajian Hicks tidak menyinggung soal lembaga adat.

Parera (1994) dalam tulisan berjudul *Sejarah Pemerintahan Raja-Raja Timor* membahas pula kepemimpinan *Liurai*. Bahasannya lebih menonjolkan perpesktif agama dengan mengatakan bahwa *Liurai* di Kerajaan Wehali digelar sebagai *Maromak Oan*,

karena berkompeten menyapa Tuhan (hlm.235—236). Tidak terdapat pembahasan tentang hal ihwal lembaga adat, termasuk fungsi-fungsinya.

Therik (2004) melalui penelitian berjudul *Wehali: The Female Land, Tradition of a Timorese Ritual Centre* pun tidak membahas tentang lembaga adat. Tulisan ini lebih banyak membahas secara etnografis asal-usul orang Wehali dan kekuasaan Liurai. Penelitian ini difokuskan pada eksplorasi mengenai Wehali dari perspektif dikotomi “pusat” dan “yang melingkari/ mengelilingi”. Tidak terdapat pembahasan khusus tentang tata pemerintahan tradisi di bawah Liurai.

Pustaka lain yang berisi kajian tentang Tetun ditulis oleh Seran (2007) dengan judul *Ema Tetun*. Secara leksikal, *ema* ‘orang’ sehingga judul tersebut diterjemahkan sebagai ‘Orang Tetun’. Penelitian ini difokuskan pada dinamika perubahan budaya orang Tetun yang disebutnya sebagai “masyarakat tradisional di pedalaman Pulau Timor”. Bab IV dari tulisan ini membahas tentang struktur sosial dan sistem politik kekuasaan di Kerajaan Fehalaran, Belu Utara; berbeda dengan penelitian Parera dan Therik yang memfokuskan penelitiannya pada masyarakat budaya Belu Selatan yang secara mitos dianggap sebagai pusat dan diyakini sebagai “yang pertama/ lebih dulu kering”. Dalam pembahasannya, Seran (2007:183—184) juga mengakui bahwa Loro Fehalaran mempunyai hubungan dengan Liurai dari Kerajaan Wesei-Wehali yang bergelar *Maromak Oan* (Putera Dewata). Seran (ibid. hlm. 331) memberikan komentar penutup dari penelitiannya ini, bahwa dari perspektif sosio-antropologis, pemerintahan (maksudnya Kabupaten Belu) mesti memperlakukan kebudayaan sebagai paradigma pembangunan.

Penelitian dan kajian yang dipaparkan terdahulu berkontribusi terhadap penelitian fungsi lembaga adat dalam guyub budaya Tetun di Malaka. Berbagai ungkapan dan istilah yang digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut dimanfaatkan pula. Di samping itu, kesadaran mengenai pentingnya paradigma pembangunan dari perspektif budaya yang direkomendasikan oleh Seran telah memperkuat pentingnya kajian tentang fungsi lembaga adat.

D. HASIL PENELITIAN

Fungsi Lembaga Adat: Penguatan Ritual

Secara tradisional, ritual sesungguhnya merupakan ekspresi dan interaksi yang bersifat magis. Atas dasar sifat magis inilah para etnolog dan antropolog mengaitkan kajiannya terhadap bahasa etnik tradisional yang lebih dikenal sebagai mitos. Sifat magis ini pulalah yang memberi ciri pada petutur dalam sebuah ritual sebagai orang yang memiliki kekuatan (daya) magis. Meskipun tampak tidak lagi menonjol, namun ciri magis dalam ritual tradisi dan para petuturnya masih tetap ada hingga saat ini.

Dalam guyub budaya Tetun di Malaka, hal-hal magis masih ditemukan pada saat dilaksanakan ritual adat/tradisi. Bahkan orang-orang tertentu dikenal masih memiliki kekuatan gaib. Namun dalam perspektif penguatan ritual dalam konteks peran lembaga adat,

setidak-tidaknya dibahas mengenai orang-orang yang memiliki peran dalam struktur lembaga adat yang bahasanya dipandang bertuah. Orang-orang semacam ini dalam struktur lembaga adat mempunyai kedudukan sebagai *Liurai*, *Loro*, *Na'in*, dan *Fukun* secara hierarkis. *Liurai* merupakan simbol kedaulatan pemimpin tradisi yang sangat besar kekuasaannya sehingga orang Tetun menyebutnya sebagai *Maromak Oan* (anak Tuhan, Penjelmaan dari Sang Pencipta). Di bawah *Liurai* terdapat *Loro* ‘raja’ yang membawahi beberapa raja (*Na'in*), dan di bawah *Na'in* terdapat *Fukun*, pemangku adat lintas suku.

Orang-orang yang memangku jabatan sebagaimana tersebut di atas mempunyai fungsi penguatan ritual. Merekalah yang berperan di dalam pelaksanaan upacara (ritual) yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan hidup warga adat dalam lingkup kepemimpinan mereka. *Loro* dan *Na'in* memimpin ritual untuk meminta hujan. Sementara *Fukun* berfungsi memimpin ritual untuk mengukuhkan anak-anak agar menjadi anggota masyarakat adat melalui ritual *Hamis Batar*. Ritual *Hamis Batar* sesungguhnya bukanlah ritual pengkuhan dimaksud, melainkan ritual panen (perdana) jagung. Dalam ritual tersebut terjadi peristiwa *kose mama* (menggosok siri-pinang) untuk tolak bala. Siri-pinang digosokkan pada dahi, bahu, siku, lutut, belakang telapak tangan, bagian atas telapak kaki; semuanya merupakan simbol terhindarnya anak-anak itu dari petaka. Anak-anak yang menerima *kose mama* boleh makan jagung yang dipanen perdana dan secara adat mereka dikukuhkan menjadi anggota masyarakat adat.

Semua ritual yang berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan warga adat merupakan fungsi bersama antara *Loro*, *Na'in*, dan *Fukun*.

Fungsi Rekonsiliasi

Fungsi rekonsiliasi ada jika telah terjadi perselisihan, konflik, ataupun peperangan antar kampung. Perkembangan masyarakat menunjukkan perselisihan atau konflik dapat terjadi di dalam keluarga. Baik konflik antarkampung maupun konflik dalam keluarga, para pemangku adat, orang-orang yang memangku jabatan adat melaksanakan fungsinya sebagai juru damai, baik melalui ritual maupun melalui pendekatan personal.

Dalam sejarah tradisi orang Tetun, *Liurai*, *Loro*, dan *Na'in* memiliki orang-orang kesatria yang disebut *Meo*. *Meo* ini berfungsi sebagai pengawal, juga sebagai pasukan untuk mengekspansi wilayah kekuasaan. Fakta sejarah menunjukkan bahwa *Meo*, meskipun sangat ditakuti oleh warga dalam satu lingkup kekuasaan raja sangat patuh kepada raja maupun musuh-musuh kerajaan, namun selalu taat dan tunduk pada perintah dan larangak raja. Ada ungkapan, “*Ita hanonoba Bei Na'in Bot, naak atu losu sa'e*” (Kita mendengar raja besar, katanya cabut, naik/ potong). Maksudnya, mereka mengikuti apa yang dikatakan raja, “cabut pedang dan tebas” dan sebaliknya, jika raja melarang untuk melakukan itu, para *Meo* tidak akan melakukannya. Menurut kepercayaan orang Tetun, jika *Meo* melawan perintah raja, malapetaka akan menimpa para *Meo*, sebagaimana terirat dalam ungkapan

Losu ta, haknua ra, artinya ‘cabut tebas, sarungkan darah.’ Sedemikian bertuahnya perkataan raja sehingga membunuh tanpa perintah ataupun persetujuannya, darah orang-orang yang dibunuh akan menuntut pembunuhnya.

Berdasarkan keterangan para narasumber, jika terjadi pertikaian atau peperangan tidak atas perintah *Loro* ataupun *Na'in*, dan pertikaian itu diambil alih penangannya oleh *Loro* ataupun *Na'in*, pertikaian atau peperangan itu pun segera berakhir. Pihak yang bertikai pun akan segera mengambil langkah yang menjurus kepada rekonsiliasi.

Fungsi Penyelamatan Lingkungan

Masyarakat adat Tetun mengenal sumber air yang disebut *We Maromak*, yang diterjemahkan secara harafiah menjadi ‘air Tuhan’. Sumber air ini menjadi keramat karena dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Hal ini menyiratkan makna perlindungan terhadap alam yang dipandang sebagai pemberian Sang Pencipta.

Liurai, Loro, dan Na'in adalah jabatan tradisi yang dijabat oleh orang-orang yang memiliki kekuatan magis, sebagaimana dijelaskan di bagian awal bahasan dari tulisan ini, bahwa kekuatan magis para pemangku jabatan tradisi itu terkait dengan tuturan yang mereka ucapkan dalam upacara/ ritual adat yang juga mempunyai kekuatan magis. Dengan demikian, hutan, air, gunung, dan seluruh habitat alam akan menjadi terlarang jika dilarang oleh para pemangku jabatan tradisi tersebut. Larangan mereka adalah ungkapan yang diyakini memiliki kekuatan magis.

Dalam pandangan masyarakat tradisi, termasuk juga dalam guyub budaya Tetun, habitat alam merupakan tempat bersemayamnya roh-roh sehingga harus dijamin pemeliharaannya. Roh-roh itu diyakini menjadi pencipta dan pemelihara hal-hal yang bersifat magis sehingga *Liurai, Loro, dan Na'in* sangat berkepentingan untuk menjaga tempat bersemayamnya roh-roh dimaksud. Salah satu leksikon untuk menjamin terpeliharanya habitat alam ialah kata *lulik* ‘pemali’. Leksikon ini sesungguhnya merupakan bentuk kreativitas bahasa untuk menjaga keaslian segala sesuatu, termasuk habitat alam. Benda apa saja yang disandingkan dengan kata *lulik*, akan mengalami trasubstansi dari benda profan ke benda sakral.

Dinamika Budaya Tetun dalam Konteks Fungsi Lembaga Adat

Budaya merupakan kesadaran kolektif manusia sehingga selalu berada dalam dinamika. Dalam kaitan dengan fungsi lembaga adat sebagaimana paparan terdahulu, gambaran dinamikanya seperti berikut ini.

- Hal ritual telah terjadi pergeseran sebagai konsekuensi dari kemajuan masyarakat dalam soal agama. Agama-agama wahyu, terutama Katolik, yang merupakan agama mayoritas orang Tetun di Malaka, telah membangun iklim inkulturasi yang serasi sehingga adat dan agama bisa saling berdampingan dan saling melengkapi. Meskipun demikian, interaksi yang intens oleh kalangan Gereja telah membuat

masyarakat adat secara perlahan-lahan meninggalkan hal-hal yang menurut pandangan mereka tidak relevan dengan perkembangan agama wahyu. Banyak ritual yang telah ditinggalkan, bukan karena dilarang oleh Gereja, tetapi karena kurangnya pemahaman mereka terhadap makna dan nilai dari ritual-ritual dimaksud. Gereja pun turut berkontribusi untuk memberikan pemahaman tentang makna dan nilai ritual adat, namun cara pandangan pragmatis membuat masyarakat secara perlahan-lahan meninggalkan ritual adat.

- Dinamika sebagaimana dipaparkan pada poin 1 berdampak pada dinamika adat berkaitan dengan fungsi rekonsiliasi. Komunikasi dan interaksi yang kaya dengan humanisme dan keberpihakan pada kesejahteraan manusia menjadikan para pemangku jabatan adat/ tradisi mengambil posisi “ke pinggir” dalam hal penyelesaian konflik/ pertikaian. Gereja dan Lembaga Adat saling memberikan posisi sehingga terpeliharanya keharmonisan dalam dinamika. Namun, posisi “ke pinggir” pemangku adat dan dominasi Gereja dalam penyelesaian konflik tidak perlu dipandang sebagai soal ‘kalah-menang’ melainkan sebagai kewajaran dinamika.
- Soal penyelamatan lingkungan tampak kerapuhan peran lembaga adat sebagaimana tampak pada sejumlah peristiwa mengganasnya buaya sebagai hewan totem bagi orang Malaka. Contoh kasus ini bukan disebabkan oleh pemangku adat mengambil posisi “ke pinggir”, tetapi masyarakat yang tidak lagi peduli terhadap ritual yang dilaksanakan oleh pemangku adatnya. Pihak Gereja dalam hal ini terus memberikan imbauan dalam konteks inkulturasi agar masyarakat terselamatkan dari malapetaka akibat terganggunya habitat hewan totem dimaksud.

E. SIMPULAN

Berdasarkan bahasan tentang fungsi Lembaga Adat dan dinamika budaya Tetun, dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

- Fungsi Lembaga Adat di Tetun dalam penyelenggaraan ritual dan penyelesaian konflik telah mengalami penyusutan sebagai konsekuensi dari dinamika budaya. Perubahan ciri tradisi ke modern merupakan suatu keniscayaan dalam masyarakat transisi.
- fungsi Lembaga Adat dalam budaya Tetun sejalan dengan fungsi lembaga keagamaan, khususnya Gereja Katolik yang sama-sama berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan manusia.
- Pemerintah daerah pun telah turut menjadi bagian dari dinamika budaya dimaksud. Realita menunjukkan bahwa lembaga adat, Gereja, dan pemerintah Kabupaten Malaka dengan seluruh tingkatan pemerintahan di bawahnya saling bersinergi untuk

pelaksanaan fungsi ritual, rekonsiliasi, dan penyelamatan lingkungan. Kondisi ini berdampak pada penyusutan fungsi Lembaga Adat, dan pada saat yang sama, fungsi yang menyusut itu bermetamorfosis menjadi fungsi Gereja dan pemerintah.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Bouman, P.J. 1982. *Sosiologi Fundamental*. Jakarta: Djembatan.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Belu. Tt. *Pesona Wisata Belu*.
- Felly, Usman dan Asih Menanti. 1994. *Teori-teori Sosial Budaya*. Jakarta: Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hicks, David. 1985. *Roh Orang Tetun di Timor Timur* (Terjemahan oleh Tim PSH dari judul asli *Tetun Ghost and Kin*). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kattsoff, L.O. 1989. *Pengantar Filsafat* (Edisi Keenam) (Alih Bahasa: Soejono Soemargono). Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Kessing, R.M. 1998. *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Erlangga.
- Koentjaraningrat 1983. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik*. Yogyakarta: LKiS.
- Mbete, Aron Meko. 2004. "Linguistik Kebudayaan: Rintisan Konsep dan Beberapa Aspek Kajiannya", dalam *Bawa, I Wayan. Bahasa dalam Perspektif Kebudayaan*. Denpasar: Penerbit Universitas Udayana.
- Meinarno, Eko A., Bambang Widiyanto dan Rizka Halida. 2011. *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat, Pandangan Antropologi dan Sosiologi*. Edisi 2. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Ola, Simon Sabon. 2013. "Karakteristik Interaksi Kultural antara Tetun di Belu dengan Tetun di Republik Demoktratic Timor Leste", dalam Simon Sabon Ola (Penyunting). *Prosiding Seminar Internasional Bulan Bahasa dan Budaya*. Kupang: Universitas PGRI NTT.
- Ola, Simon Sabon. 2013. "Tetun Culture Profile in Belu District, East Nusa Tenggara Province", dalam Ida Bagus Putra Yadnya (Chief Editor). *Proceeding 6th International Seminar on Austronesian—Non-Austronesian Languages and Literatures*. Denpasar: Udayana University Press.
- Parera, A.D.M. 1994. *Sejarah Pemerintahan Raja-Raja di Timor* (Editor: Gregor Neonbasu). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tim Lembaga Penelitian Undana Kupang. 2005. "Rencana Operasional Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur". Kupang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Seran, Herman Joseph.2010. *Ema Tetun, Kelangsungan dan Perubahan dalam Kebudayaan dan Kehidupan Sosial Suatu Masyarakat Tradisional di Pedalaman Pulau Timor, Indonesia Bagian Timur*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Verger, K.J. 1986. *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: PT Gramedia.



**BENTUK DAN MAKNA MAJAS METAFORA BINATANG
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI KABUPATEN MANGGARAI**

Fransiskus Bustan

frankybustando@gmail.com

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang

Yohanis S. Sarong

jhonsarong123@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang

Frans Gana

ganafrans@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang

ABSTRACT

This study explores the form and meaning of animal metaphor figurative language used in the general election of regent in Manggarai regency in 2014. The study is viewed from cultural linguistics with special reference to animal metaphor. This is a descriptive study. The results of study show that the forms and meanings of animal metaphor used in the election of regent in Manggarai regency in 2014 are unique and specific, as reflected in sentence, *Tekur cai retuk, lawo cai bao* 'The turtle that has just arrived, the mouse that has just arrived'. This is a compound sentence made up of two independent clauses that include (1) *Tekur cai retuk* 'The turtle that has just arrived' and (2) *Lawo cai bao* 'The mouse that has just arrived'. Along with its context, the animal metaphor is used by the old candidate to designate that the new candidate is still young and, as such, he has no enough competence, skill and experience to lead Manggarai. It is used to influence the the political preference of Manggarai people as grass roots to elect the old candidate. In terms of its meanings, the animal metaphor reveals the polical arrogance of old candidate by insulting young candidate.

Keywords: *form, meaning, animal metaphor, election of regent, Manggarai*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum seperti pemilihan presiden, pemilihan gubernur, dan pemilihan kepala daerah adalah suatu perhelatan politik rakyat dalam tatanan kehidupan suatu negara demokrasi yang dirancang dan dilaksanakan secara khusus dengan tujuan utama untuk memilih pemimpin yang akan menahkodai negara, provinsi, dan daerah dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini jangka waktu lima tahun, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam upaya mencapai tujuan dimaksud, proses dan mekanisme pelaksanaan pemilihan umum tersebut begitu sarat persaingan karena kandidat yang ikut bertarung sebagai kontestan berusaha melalui berbagai bentuk dan cara mempengaruhi preferensi politik rakyat sebagai akar rumput demi mencapai kemenangan dan kesuksesan sesuai resapan keinginan dan harapannya.

Untuk mencapai kemenangan dan kesuksesan sesuai resapan keinginan dan harapannya itu, para kandidat memakai berbagai jenis simbol berupa simbol material dan simbol nonmaterial sebagai media bagi mereka

dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyat sebagai akar rumput. Selain bermaksud menampilkan citra diri mereka sebagai kandidat yang dipandang layak jadi pemimpin, pemakaian media simbolik tersebut juga bertujuan mempengaruhi preferensi politik rakyat sebagai akar rumput agar memilih mereka sebagai pemimpin. Karena itu, tidak heran jika pemilihan umum seperti pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan pemilihan kepala daerah dipahami dan dimaknai pula sebagai ajang perang simbol antarkandidat untuk mencapai kemenangan atau kesuksesan.

Seperti halnya simbol material, jenis simbol nonmaterial yang dipakai kandidat dalam konteks pemilihan umum bermacam-macam. Meskipun demikian, bahasa adalah jenis simbol nonmaterial paling mengemuka dan menonjol yang dipakai karena bahasa mempunyai energi luar biasa dalam mempengaruhi preferensi politik rakyat sebagai akar rumput. Sebagaimana disaksikan dalam rangkaian kegiatan sosialisasi dan temu muka dengan rakyat sebagai akar

rumpun, fenomena pemakaian bahasa tersebut tidak saja diwahanai secara tertulis atau dalam bentuk tulis tetapi juga disampaikan secara lisan atau dalam bentuk lisan. Terlepas dari media yang dipakai untuk mewahanai penyampaiannya, salah satu fenomena pemakaian bahasa dalam konteks pemilihan umum ditandai dengan pemakaian majas atau gaya bahasa. Ditilik dari dua kutub tanda linguistik, bentuk, dan makna satuan kebahasaan atau satuan ujaran yang dipakai dalam majas tersebut memiliki karakteristik khas sesuai kekhususan konteks situasi pemilihan umum yang sedang berlangsung dan konteks sosial budaya masyarakat sebagai akar rumpun. Hal itu dapat disaksikan, antara lain, dalam konteks pemilihan kepala daerah di Kabupaten Manggarai pada tahun 2014.

Dengan merujuk pada fenomena yang dikemukakan di atas sebagai latar pikir, dalam penelitian ini, dikaji secara khusus tentang majas metafora binatang yang dipakai dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Manggarai, sebagai salah satu kabupaten di wilayah Manggarai yang terletak di bagian barat Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bustan, 2005; Bustan, 2006; Bustan et al, 2017); Bustan and Liunokas, 2019); Bustan and Semiun, 2019), dengan merujuk secara khusus pada pemilihan kepala daerah yang berlangsung di Kabupaten Manggarai pada tahun 2014. Mengingat majas metafora binatang sebagai masalah pokok yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini begitu luas, maka cakupan aspek sebagai titik incar utama yang menjadi sasaran kajian dalam penelitian ini ditilik dari dua kutub tanda linguistik, dalam hal ini bentuk dan makna satuan kebahasaan atau satuan ujaran yang dipakai kandidat atau calon (Hasan, 1989; Foley, 1997). Bentuk berpadanan dengan penanda dan makna berpadanan dengan petanda dalam peristilahan Saussure (Culler, 1996; Foley, 1997; Gordon, 2002) atau bentuk berpadanan dengan ekspresi dan makna berpadanan dengan isi dalam peristilahan Gleason (1961). Bentuk adalah fitur satuan kebahasaan atau satuan ujaran yang tampak secara fisik dalam tataran muka atau struktur muka dan makna adalah esensi isi pesan yang tersurat dan tersirat melalui bentuk satuan kebahasaan atau satuan ujaran yang dipakai sebagai gaung kehendak atau isyarat maksud yang terjelma melalui fungsi yang sedang dilaksanakan satuan kebahasaan atau satuan ujaran tersebut. Karena itu, analisis makna tidak saja merujuk pada bentuk satuan kebahasaan atau satuan ujaran yang tampak secara fisik dalam tataran muka atau struktur muka, tetapi juga mengacu pada fungsi sesuai tugas yang sedang diemban dan diperani satuan kebahasaan atau satuan ujaran tersebut (Bustan, 2005).

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena bentuk dan makna satuan kebahasaan atau satuan ujaran dalam majas metafora binatang yang dipakai dalam konteks pemilihan kepala daerah di Kabupaten Manggarai pada tahun 2014 memiliki karakteristik khas dan khusus sesuai konteks situasi dan konteks sosial budaya masyarakat Manggarai sebagai lingkungan nirkata yang melatari kehadiran, pemakaian, dan pemaknaannya. Bersamaan dengan itu, alasan lain adalah

karena belum ada hasil penelitian yang mengkaji secara khusus dan mendalam tentang bentuk dan makna satuan kebahasaan dalam majas metafora binatang yang dipakai dalam konteks pemilihan kepala daerah di Kabupaten Manggarai pada tahun 2014 ditinjau dari perspektif linguistik kultural, salah satu perspektif teoritis baru dalam linguistik kognitif yang mengkaji hubungan bahasa, kebudayaan, dan konseptualisasi (Palmer, 1996; Foley, 1997; Sibaranai, 2004; Bustan, 2005; Palmer and Sharifian, 2007).

Bertalian dengan masalah pokok sebagai objek yang menjadi fokus kajiannya, secara umum, penelitian ini bertujuan memaparkan majas metafora binatang dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Manggarai, sebagaimana tercermin dari aspek bentuk dan makna satuan kebahasaan yang dipakai. Sesuai cakupan aspek sebagai titik incar utama yang menjadi sasaran kajian, secara khusus, penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: (1) memaparkan bentuk majas metafora binatang yang dipakai dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Manggarai dan (2) memaparkan makna majas metafora binatang yang dipakai dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Manggarai. Parameter waktu yang menjadi rujukan dan acuan analisis, sebagaimana disinggung sebelumnya, adalah pemilihan kepala daerah di Kabupaten Manggarai pada tahun 2014.

Selain bermanfaat secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat pula secara praktis. Dalam tataran teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat menunjang beberapa teori terkait, termasuk (1) linguistik kultural pada umumnya dan metafora pada khususnya sebagai salah satu masalah pokok sebagai objek kajian linguistik kultural, (2) teori wacana khususnya wacana politik, dan (3) teori sosiolinguistik yang berkenaan dengan register. Dalam tataran praktis, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai (1) salah satu sumber rujukan tambahan dalam mengkaji hubungan bahasa Manggarai, kebudayaan Manggarai, dan konseptualisasi masyarakat Manggarai dalam ranah politik dan (2) salah satu sumber rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut fenomena pemakaian majas metafora dalam konteks pemilihan kepala daerah di Kabupaten Manggarai pada masa akan datang.

B. KERANGKA TEORI

Kerangka teori sebagai anjungan berpikir dalam penelitian ini, sebagaimana disinggung di atas, adalah linguistik kultural sebagai salah satu perspektif teoritis baru dalam linguistik kognitif yang mengkaji hubungan bahasa, kebudayaan, dan konseptualisasi (Palmer, 1996; Foley, 1997; Sibarani, 2004; Bustan, 2005; Palmer and Sharifian, 2007). Kajian tersebut berpilar pada asumsi dasar adanya hubungan yang begitu erat antara bahasa dan kognisi atau pikiran (Casson, 1981; Stross, 1981; Wallace, 1981). Dalam perspektif linguistik kultural, bahasa ditelaah melalui prisma atau lensa kebudayaan dengan tujuan menyingkap konseptualisasi yang terpatrit dan tertera dalam peta kognitif atau pengetahuan budaya suatu masyarakat sebagai anggota guyub tutur yang menjadi subjek penutur bahasa bersangkutan dalam

memandang dunia (Foley, 1997; Bustan, 2005; Bustan et al, 2017).

Fenomena pemakaian bahasa sebagai cerminan kebudayaan suatu masyarakat sebagai anggota suatu guyub tutur dalam menyingkap konseptualisasi yang terpatri dan tertera dalam peta kognitif atau pengetahuan budaya mereka tentang dunia tercermin, antara lain, dalam pemakaian majas metafora (Palmer and Sharifian, 2007; Kovecses, 2009; Bustan, 2006; Bustan et al, 2017). Metafora adalah salah satu majas atau gaya bahasa yang hampir selalu dipakai manusia dalam konteks kehidupannya sebagai anggota suatu masyarakat dalam upaya mewahanai penyingkapan pikiran dan pandangan mereka tentang dunia. Fenomena pemakaian majas metafora dalam komunikasi bahasa adalah salah satu evidensi lingustik yang tidak saja menunjukkan ciri kesemestaan bahasa dalam pemakaian sebagai media komunikasi paling efektif bagi manusia dalam menyingkap pikiran dan pandangannya tentang dunia, tetapi sekaligus juga menggambarkan adanya relasi yang begitu erat antara bahasa dan kognisi atau pikiran (Palmer, 1996; Foley, 1997; Bustan, 2005; Bustan, 2006; Palmer and Sharifian, 2007).

Konsepsi ini bertalian dengan pandangan Wahab (1990) yang menyatakan, bahwa sistem konsepsi manusia dalam berpikir selalu diwahanai melalui pemakaian metafora atau ungkapan metaforis dalam menyingkap pikiran dan pandangannya tentang dunia. Ditilik dari perspektif filosofis, manusia memakai metafora atau ungkapan metaforis dalam melakukan komunikasi bahasa karena bahasa dalam pemakaiannya sebagai media komunikasi bagi manusia tidak mampu melukiskan secara langsung berbagai hal. Karena itu, manusia memakai cara-cara tidak langsung melalui pemakaian ungkapan-ungkapan berupa satuan kebahasaan atau satuan ujaran bermakna ganda yang tampil dalam bentuk metafora atau ungkapan metaforis (Cassirer, 1987; Bustan, 2006; Bustan et al, 2017).

Mencermati proses dan mekanisme komunikasi bahasa yang terjadi dalam tatanan kehidupan suatu masyarakat yang menjadi anggota guyub tutur bahasa bersangkutan, ditemukan begitu banyak jenis majas metafora yang dipakai. Seperti disinggung sebelumnya, hal ini dikarenakan sistem konsepsi manusia dalam berpikir selalu diwahanai melalui pemakaian metafora atau ungkapan metaforis sebagai wadah dan wahana penyingkapan pikiran dan pandangan tentang dunia. Sesuai konteks kewacanaan sebagai latar yang mewadahi dan mewahanai pemakaiannya, jenis majas metafora tersebut dapat dibedakan atas metafora nominal berupa metafora dalam tataran nomina, metafora predikatif berupa metafora dalam tataran verba, dan metafora kalimat berupa metafora dalam tataran kalimat. Dilihat dari sumber rujukan yang melatari dan mendasari pembentukannya, metafora nominal dapat dipilah dan dibedakan lebih lanjut atas beberapa jenis, termasuk metafora manusia, metafora tumbuhan, dan metafora binatang (Wahab, 1990).

Khusus metafora binatang, seperti tersurat dari namanya, adalah jenis metafora nominal yang dicirikan

dengan pemakaian nama binatang atau anggota tubuh binatang yang dilekatkan dengan entitas lain di luar dirinya. Selain menciptakan suatu bentuk baru yang tampil berupa kata jadian sebagai hasil penggabungan, pelekatan nama binatang atau anggota tubuh binatang tersebut membentuk dan menciptakan suatu makna baru berupa perluasan atau peregangan makna dari makna denotatif atau makna kanonik yang menunjuk pada makna tesktual menjadi makna konotatif atau makna nonkanonik yang menunjuk pada makna kontekstual (Verhaar, 1999; Foley, 1997). Perluasan atau peregangan makna majas metafora tersebut dicirikan berdasarkan adanya kemiripan fitur, kualitas dan perilaku dalam tataran tertentu antarentitas yang diperbandingkan secara analogis dan tersirat (Bustan, 2006; Bustan et al, 2017).

Fenomena pemakaian majas metafora binatang dapat ditemukan dalam berbagai ranah kehidupan suatu masyarakat, tidak terkecuali dalam ranah politik. Fenomena pemakaian majas metafora binatang dalam ranah politik dapat disimak dan disaksikan, antara lain, dalam konteks pemilihan umum sebagai media komunikasi politik antara kandidat dan rakyat sebagai akar rumput atau konstituen. Pemakaian majas metafora tersebut bertujuan merayu dan mempengaruhi preferensi politik rakyat sebagai akar rumput atau konstituen agar mereka menjatuhkan pilihan politiknya pada kandidat yang dipandang layak menjadi pemimpin dan bukan kandidat yang disemat dengan predikat binatang melalui pemakaian majas metafora binatang dimaksud.

C. METODE PENELITIAN

Sesuai masalah pokok sebagai objek yang menjadi fokus kajiannya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif (Muhadjir, 1995) karena memaparkan data tentang majas metafora binatang dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Manggarai pada tahun 2014 di Kabupaten Manggarai sebagaimana dan apa adanya ditilik dari aspek bentuk dan makna satuan kebahasaan yang dipakai. Penelitian ini bersumber pada dua jenis data termasuk data primer dan data sekunder. Sesuai jenis data yang dipakai sebagai sumber rujukan, prosedur penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan (Mulyana, 2002).

Penelitian lapangan bertujuan untuk mendapat data primer yang dilakukan di Kota Ruteng sebagai ibu-kota Kabupaten Manggarai sebagai lokasi utama penelitian. Sumber data adalah masyarakat Manggarai di kota Ruteng yang diwakili tiga orang informan kunci. Metode pengumpulan data adalah wawancara berupa wawancara semuka dan wawancara tansemuka, yang dalam penerapannya dipadukan dengan teknik elisitasi, rekam, dan simak-catat (Spradley, 1997; Sudikan, 2001; Mulyana, 2002). Penelitian kepustakaan bertujuan mendapat data sekunder yang dilakukan dengan menggunakan metode studi dokumenter untuk mencapai tujuan dimaksud. Jenis dokumen yang dipakai sebagai acuan dalam proses pemerolehan data tersebut adalah hasil penelitian, artikel, dan sebagainya (Mulyana, 2002).

Data terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan memakai metode induk, analisis bergerak dari data menuju konsep atau teori lokal-ideografis (Sudikan, 2001) karena hanya berlaku khusus dalam masyarakat Manggarai sebagai penutur asli bahasa Manggarai sesuai fungsi dan kebermaknaan bahasa Manggarai sebagai cerminan kebudayaan Manggarai. Karena peneliti adalah anggota penutur asli bahasa Manggarai, proses analisis data tersebut menggunakan pula teknik refleksi-introspeksi dengan memanfaatkan pemahaman dan pengalaman peneliti sebagai bahan pembanding dalam melakukan pengecekan silang terhadap informasi yang digali dan dijaring dari informan kunci demi kepentingan triangulasi data (Sudikan, 2001).

D. HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa terdapat hubungan begitu erat antara bahasa Manggarai, kebudayaan Manggarai dan konseptualisasi masyarakat Manggarai dalam memandang dunia, sebagaimana tercermin dalam bentuk dan makna majas metafora binatang yang dipakai dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Manggarai pada tahun 2014. Bentuk dan makna bahasa Manggarai yang dipakai dalam majas metafora binatang tersebut memiliki karakteristik khas dan khusus dalam kebudayaan Manggarai karena, selain berkaitan dengan konteks situasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Manggarai pada tahun 2014, bentuk dan makna metafora binatang yang dipakai itu bertalian dengan konteks sosial budaya masyarakat Manggarai sebagai subjek penutur yang menjadi anggota guyub tutur bahasa Manggarai dalam tautan perannya mereka sebagai akar rumput dalam konteks pemilihan kepala daerah dimaksud.

Berdasarkan hasil seleksi data yang dilakukan, bentuk majas metafora binatang yang dipakai dalam konteks pemilihan kepala daerah di Kabupaten Manggarai pada tahun 2014 adalah *Tekur cai retuk, lawo cai bao* 'Tekukur datang tadi, tikus datang tadi'. Majas metafora ini dicirikan sebagai majas metafora binatang karena memakai nama binatang, dalam hal ini *tekur* 'burung tekukur' dalam sandingan dengan *lawo* 'tikus', sebagai analogi perbandingan tersirat. Majas metafora binatang itu dipakai kandidat petahana sebagai predikat atau sebutan untuk kandidat pendatang baru dari kalangan generasi muda yang tampil sebagai pesaingnya. Majas metafora binatang itu dipakai kandidat petahana dengan maksud dan tujuan untuk mempengaruhi preferensi politik rakyat Manggarai sebagai akar rumput dan konstituen agar mereka tidak memilih kandidat pendatang baru dari kalangan generasi muda. Sesuai maksud dan tujuannya, alasan yang menjadi latar pikir adalah, kandidat pendatang baru dipandang belum memiliki kemampuan, kecakapan, dan pengalaman memadai untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah di Kabupaten Manggarai.

Bahasan

Sesuai cakupan aspek sebagai sasaran pemerian, berikut dipaparkan bentuk dan makna majas metafora binatang yang dipakai dalam konteks pemilihan kepala daerah di Kabupaten Manggarai pada tahun 2014. Mekanisme analisis bentuk dan makna tersebut merujuk pada kenyataan bentuk tekstual yang tampak secara fisik dalam struktur muka dalam sandingan dengan konteks situasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Manggarai pada tahun 2014 dan konteks sosial budaya rakyat Manggarai sebagai lingkungan nirkata yang melatari kehadiran, pemakaian, dan pemaknaan majas metafora binatang dimaksud.

Bentuk

Sesuai kenyataan bentuk tekstual yang tampak secara fisik dalam struktur muka, majas metafora binatang, *tekur cai retuk, lawo cai bao* 'tekukur datang tadi, tikus datang tadi', adalah sebuah kalimat majemuk setara sebagai hasil perpaduan dua klausa independen berupa kalimat lengkap atau sempurna sebagai unsur bawahannya. Seperti tampak pada data, kedua klausa independen sebagai unsur bawahannya adalah (1) *tekur cai retuk* 'burung tekukur baru datang tadi' dan (2) *lawo cai bao* 'tikus baru datang tadi'.

Perpaduan kedua klausa independen tersebut membentuk sebuah konstruksi kalimat majemuk setara yang bersifat asynton karena tidak dihubungkan dengan pemakaian konjungsi kordinatif *agu* 'dan' atau *ko* 'atau' sebagai kata perangkai. Seandainya konjungsi kordinatif *agu* 'dan' atau *ko* 'atau' dipakai, maka kalimat tersebut berbunyi, *tekur cai retuk agu lawo cai bao* 'burung tekukur baru datang tadi dan tikus baru datang tadi' atau *tekur cai retuk ko lawo cai bao* 'burung tekukur baru datang tadi atau tikus baru datang tadi'. Penambahan konjungsi tersebut tidak berterima karena, selain dapat menyebabkan terjadinya bias makna, kalimat majemuk setara tersebut merupakan suatu bentuk atau konstruksi kalimat yang dipandang sudah baku dalam bahasa Manggarai sesuai kovensi sosial masyarakat Manggarai sebagai anggota guyub tutur Manggarai.

Subjek (S) dalam klausa independen (01), *tekur cai retuk* 'burung tekukur baru datang tadi', adalah kata (nomina) *tekur* 'burung tekukur' dan predikat (P) adalah verba (frasa verbal) *cai retuk* 'barusan datang'. Frasa verbal ini terbentuk dari kata (verba) *cai* 'datang' sebagai kata inti dan kata (adverbia) *retuk* 'barusan' sebagai adverbia pemarkah temporal. Subjek (S) dalam klausa independen (02), *lawo cai bao* 'tikus baru datang tadi', adalah kata (nomina) *lawo* 'tikus' dan predikat (P) adalah verba (frasa verbal) *cai bao* 'baru datang tadi'. Frasa verbal ini terbentuk dari kata (verba) *cai* 'datang' sebagai kata inti dan kata (adverbia) *bao* 'tadi' sebagai adverbia pemarkah temporal. Kata (adverbia pemarkah temporal) *retuk* 'barusan' berhubungan secara sinonimis atau berpadanan secara maknawi dengan kata (adverbia pemarkah temporal) *bao* 'tadi' dengan maksud menunjang dan mempertegas makna pesannya.

Ditilik dari pilihan kata dan cara pengungkapannya, kedua klausa independen di atas

mengandung keindahan bentuk yang mengundang kenikmatan inderawi ketika dituturkan dan disimak. Dimensi keindahan bentuk yang mengundang kenikmatan inderawi ketika dituturkan dan disimak ditandai dengan kehadiran beberapa fenomena kebahasaan berikut: (a) fenomena pemakaian struktur paralelisme fonologis yang bersifat asimetris berupa fenomena permainan fonem vokal yang tidak sama, yakni fenomena permainan fonem vokal *e-u* dalam kata (nomina) *tekur* ‘tekukur’ dan kata (adverbia) *retuk* ‘tadi’ sebagai adverbia pemarkah temporal serta fenomena permainan fonem vokal tersebut adalah *a-u* dalam kata (nomina) *lawo* ‘tikus’ dan kata (adverbia) *bao* ‘tadi’ sebagai adverbia pemarkah temporal dalam klausa independen (02); (b) banyaknya kata yang dipakai dalam klausa independen (01) dan klausa independen (02) sama-sama berjumlah tiga kata sehingga terjadi keseimbangan dalam penuturan; dan (c) fenomena perulangan kata (verba) *cai* ‘tiba’ sebagai predikat (P) dalam klausa independen (01) dan klausa independen (02).

Makna

Sesuai fungsi dan kebermaknaannya sebagai majas metafora binatang, pengertian kata atau istilah *tekur* ‘tekukur’ yang berfungsi sebagai subjek (S) dalam klausa independen (01) dan kata atau istilah *lawo* ‘tikus’ yang berfungsi sebagai subjek (S) dalam klausa independen (02) mengalami proses perluasan atau peregangan makna dari makna denotatif atau makna kanonik atau makna tekstual menjadi makna konotatif atau makna nonkanonik atau makna kontekstual. Secara denotatif, makna kanonik atau makna tekstual majas metafora binatang tersebut menunjuk pada burung tekukur dan tikus yang barusan datang atau tiba. Sesuai konteks yang melatari pemakaiannya, majas metafora binatang tersebut mengalami perluasan atau peregangan makna dari makna denotatif atau makna kanonik menjadi makna konotatif atau makna nonkanonik yang ditandai dengan perbandingan dan analogi tersirat berdasarkan adanya kemiripan fitur, kualitas, dan perilaku dalam tataran tertentu dalam pencitraan kandidat pendatang baru oleh kandidat petahana.

Majas metafora binatang tersebut dipakai kandidat petahana dalam memberikan atribut kepada kandidat pendatang baru sebagai pesaingnya dalam konteks pemilihan kepala daerah di Kabupaten Manggarai pada tahun 2014. Kandidat pendatang baru dikonsepsikan kandidat petahana sebagai kandidat pemimpin yang belum memiliki kemampuan, kecakapan, dan pengalaman memadai dalam memimpin sehingga dianggap tidak atau belum layak menjadi kepala daerah di Kabupaten Manggarai. Konsepsi tersebut ditandai dengan pemakaian kata (adverbia) pemarkah temporal *retuk* ‘barusan’ sebagai adverbia pemarkah temporal dalam frasa verbal *cai retuk* ‘barusan datang’ pada klausa independen (01) dan pemakaian kata (adverbia) *bao* ‘tadi’ sebagai adverbia pemarkah temporal dalam frasa verbal *cai bao* ‘baru datang tadi’ pada klausa independen (02).

Sesuai karakteristik makna tanda linguistik atau satuan kebahasaan yang dipakai dalam majas metafora binatang tersebut, kandidat pendatang baru sebagai representasi dari kalangan generasi muda yang ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Manggarai pada tahun 2014 dipandang oleh kandidat petahana belum layak dan pantas dipilih menjadi pemimpin di Kabupaten Manggarai. Alasan yang mendasarinya, kandidat pendatang baru belum memiliki kemampuan, kecakapan, dan pengalaman memadai dalam memimpin sehingga dipandang tidak atau belum layak mengemban tugas dan tanggungjawab sebagai kepala daerah Kabupaten Manggarai. Mencermati esensi isinya, secara konotatif, pemakaian majas metafora binatang tersebut, selain menyiratkan makna peremehan, pelecehan, dan penghinaan terhadap kemampuan, kecakapan, dan pengalaman kandidat pendatang baru, juga menunjukkan kesombongan, kecongkakan, atau kepongahan politik yang ditampilkan kandidat petahana dalam konteks pemilihan kepala daerah di Kabupaten Manggarai pada tahun 2014 yang menganggap rendah kandidat pendatang baru dari kalangan generasi muda yang menjadi pesaingnya. Kesombongan, kecongkakan, dan kepongahan politik yang ditampilkan kandidat petahana melalui pemakaian majas metafora binatang tersebut merupakan perilaku politik yang tidak mendidik karena menutup ruang dan peluang untuk kalangan generasi muda ikut bertandang secara sejajar sebagai kontestan dalam konteks pemilihan kepala daerah di Kabupaten Manggarai pada tahun 2014. Meskipun demikian, pemakaian majas metafora binatang semacam itu dipandang lumrah dalam ranah politik karena pesta demokrasi seperti pemilihan kepala daerah, sebagaimana dilaksanakan di Kabupaten Manggarai pada tahun 2014, merupakan ajang perang simbol antarkandidat dan salah satu jenis simbol nonmaterial paling mengemeuka yang dipakai sebagai mesiu adalah bahasa.

E. PENUTUP

Pemakaian majas metafora adalah salah satu evidensi linguistik yang menunjukkan adanya hubungan begitu erat antara bahasa dan kognisi atau pikiran manusia, selain mencirikan kesemestaan bahasa karena pemakaian metafora terdapat atau ditemukan dalam semua bahasa di dunia, tidak terkecuali dalam bahasa Manggarai. Pemakaian majas metafora dalam bahasa Manggarai dapat disaksikan dalam ranah politik yang ditandai dengan pemakaian majas metafora binatang dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Manggarai pada tahun 2014. Majas metafora binatang yang dipakai adalah *tekur cai retuk, lawo cai bao* ‘tekukur baru datang tadi, tikus baru datang tadi’ sebagai predikat yang disemat kandidat petahana untuk kandidat pendatang baru dari kalangan generasi muda yang menjadi pesaingnya. Meskipun mengandung keindahan bentuk yang mengundang kenikmatan inderawi ketika disimak, ditilik dari esensi isinya, fenomena pemakaian metafora binatang tersebut menyiratkan (1) pelecehan dan penghinaan terhadap kemampuan, kecakapan, dan

pengalaman kandidat pendatang baru dan (2) menunjukkan kesombongan, kecongkakan dan kepongahan politik kandidat petahana yang menganggap remeh terhadap kemampuan, kecakapan, dan pengalaman kandidat pendatang baru sebagai pesaing dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah di Kabupaten Manggarai.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Bustan, F. (2005). "Wacana Budaya *Tudak* dalam Ritual *Penti* pada Kelompok Etnik Manggarai Di Flores Barat: Sebuah Kajian Linguistik Budaya". *Disertasi*. Denpasar: Program Doktor (S3) Linguistik Universitas Udayana.
- Bustan, F. (2006). "Metafora Sebagai Sebuah Figurasi Gagasan dalam Komunikasi Bahasa." *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, Volume 10, Nomor 18. Kupang: Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP Undana Kupang.
- Bustan, F., Semiun, A., and Bire, J. (2017). *The Features of Anthropomorphic Metaphor in the Manggarai Language*. Balti: LAP LAMBERT Academic Publishing.
- Bustan, F and Liunokas, Y. (2019). *The Forms and Meanings of Verbal Expressions on The Existence of God As A Supernatural Power in Manggarai Language (A Cultural Linguistic Analysis)*. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. Volume 5, Issue 3, 2019 Special Edition: Science, Applied Science, Teaching and Education, pp.442-457.
- Bustan, F and Semiun, A. (2019). *The Cultural Discourse of Baby Birth in Manggarai Speech Community*. Balti: LAP LAMBERT Academic Publishing.
- Cassirer, E. (1987). *Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esei Tentang Manusia*. Diterjemahkan oleh Alois A. Nugroho. Jakarta: Gramedia.
- Casson, R. W. (1981). *Language, Culture and Cognition: Anthropological Perspectives*. New York: Macmillan.
- Culler, J. (1996). *Saussure*. Diterjemahkan oleh Rochayah dan Siti Suhayai. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Faisal, S. (1990). *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3).
- Foley, W. A. (1997). *Anthropological Linguistics: An Introduction*. Oxford: Blackwell.
- Gleason, H. A. (1961). *An Introduction to Descriptive Linguistics*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Gordon, T. W. (2002). *Saussure untuk Pemula*. Diterjemahkan oleh Mey Stiyanta dan Hendrikus Panggalo. Yogyakarta: Kanisius.
- Hasan, R. (1989). *Linguistics, Language and Verbal Art*. Victoria: Deakin University.
- Kovecses, Z. (2009). "Metaphorical meaning making: discourse, language and culture". *Quardens de Filologia. Estudis Linguistics*. Vol. XIV (2009) 135-151.
- Muhadjir, N. (1995). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Telaah Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, Realisme Metaphisik*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulyana, D. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Palmer, G. B. 1996. *Toward a Theory of Cultural Linguistics*. Austin: The University of Texas Press.
- Palmer, G. B., and Farzad, F. 2007. "Applied cultural linguistics: an emerging paradigm." *Applied Cultural Linguistics*. Edited by Farzard Sharifian and Gary B. Palmer. Amsterdam: John Benjamin.
- Sibarani, R. (2004). *Antropolinguistik: Antropolinguistik - Linguistik Antropologi*. Medan: Penerbit Poda
- Spradley, J. P. (1997). *Metode Etnografi*. Diterjemahkan oleh Misbah Zulfa Elizabeth. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Stross, B. (1981). "Language, culture and cognition." *Language, Culture and Cognition: Anthropological Perspectives*. Edited by Ronald W. Casson. New York: Macmillan.
- Sudikan, S. Y. (2001). *Metode Penelitian Kebudayaan*. Surabaya: Unesa Unipress bekerjasama dengan Citra Wacana.
- Wallace, A. F. C. (1981). "Culture and cognition". *Language, Culture, and Cognition: Anthropological Perspectives*. Edited by Ronald W. Casson. New York: Macmillan.
- Verhaar, J. M. W. (1999). *Asas-asas Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Wahab, A. (1990). *Butir-Butir Linguistik*. Surabaya: Airlangga University Press.



MEMBACA WAJAH IBU KANDUNG DAN IBU PERTIWI DALAM FILM TANAH AIR BETA: SEBUAH KAJIAN SEMIOTIK

Marselus Robot

Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Undana

marcelrob32@gmail.com

ABSTRACT

The article analyses a Film by Ari Sihasale: Tanah Air Beta. The film is about the lives of refugees caught in double depression, to leave their family or to choose Indonesia as their new country or to leave Indonesia for their family? However the worst case is their limit of understanding about civil war after the referendum on 8 May 1999. Theory used in this study is perspective semiotics by Roland Barthes. Semiotics by Barthes analyses meaning through denotation, connotation and myth. Method used in this study is qualitative method. The method is used because the analyzed data are sentences or paragraphs consisting of denotation, connotation and myth. Result of the study shows that the Tanah Air Beta film exhibits sufferings of refugees living in emergency evacuation, psychological pain of the refugees leaving their families and their uncertainty lives in Indonesia.

Keywords: referendum, refugees, film, conflict, semiotic

A. PENDAHULUAN

Film merupakan salah satu media komunikasi massa yang begitu setia mengucapakan realitas sosial di mana film itu diproduksi. Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, kemudian memproyeksikannya ke atas layar, (Irwanto dalam Sobur, 2006:127). Turner (dalam Sobur, 2006:127) lebih jauh mengkritisi tentang film sebagai refleksi masyarakat. Turner menolak perspektif yang melihat film sebagai refleksi masyarakat. Bagi Turner, perspektif ini sangat primitif dan menggunakan metafor yang tidak memuaskan karena menyederhanakan setiap komposisi ungkapan, baik dalam film, prosa, atau bahkan percakapan antara film dan masyarakat sesungguhnya terdapat kompetisi dan konflik dari berbagai faktor yang menentukan, baik bersifat kultural, subkultural, industrial, serta institusional. Makna film sebagai representasi dari realitas masyarakat, menurut Turner, berbeda dengan film sekadar sebagai refleksi dari realitas. Sebagai refleksi dari realitas film sekadar “memindah” realitas ke layar tanpa mengubah realitas itu. Sementara itu, sebagai representasi dari realitas film membentuk dan “menghadirkan kembali” realitas berdasarkan kode-kode, konvensi-konvensi, dan ideologi dari kebudayaannya

Film Tanah Air Beta (TAB) merupakan salah satu karya Alenia Production. Film ini menuturkan persoalan pengungsi (eksodus) warga Timor ke Nusa Tenggara Timur sebagai konsekuensi referendum tanggal 8 Mei

1999 di Timor Timur. Film TAB mirip kaca pengintai yang begitu tekun memantulkan fenomena kemanusiaan dan penderitaan warga Timor Timur yang hidup di bawah kamp-kamp darurat. Suatu hal yang unik bahwa pengungsi sendiri tidak mengerti mengapa semua itu terjadi. Dua beban yang dipikul pengungsi selama proses dramatis itu. Beban pertama, ada barang-barang bawaan yang dipikul di pundaknya, dan beban kedua adalah ketidaktahuan para pengungsi tentang konflik itu. Beban kedua ini dipikul oleh pikirannya.

Ceritera dirangkai secara melodramatik, menggerus emosi, dan mengumbar rasa kesedihan yang tak tertahankan. Merry (10 tahun) tinggal berdua dengan ibu gurunya Tatiana di sebuah kamp pengungsian di Tua Pukan (Kupang, Nusa Tenggara Timur). Sedangkan kakak laki-lakinya, Mauro (12 Tahun) tinggal bersama pamannya di Timor Leste. Tatiana dan Merry hidup di kamp bersama pengungsi lainnya di antaranya Abu Bakar, seorang keturunan Arab yang sudah turun-temurun hidup di Timor – Timur. Tatiana mengajar di sebuah Sekolah Dasar darurat, sekolah khusus untuk anak-anak pengungsi. Sekolah Tenda ini digunakan sebagai pemulihan trauma bagi anak-anak pengungsi. Merry bersekolah di tempat itu bersama Carlo, seorang anak laki-laki yang jenial tapi nakal. Carlo paling suka mengganggu Merry. Sedangkan Merry terlihat pendiam, sering mengambil keputusan tanpa intervensi siapa pun.

Ide dasar film TAB adalah kemurungan pengungsi (warga negara) antara kepatuhan kepada negara Republik Indonesia (nasionalisme) dan kecintaan kepada keluarga. Carlos (seorang anak usia sekolah) ingin bertemu ibu kandungnya di Motaain (perbatasan Atambua-NTT dengan Timor Leste). Ibunya sedang sakit di Tim-Tim. Imajinasi Carlos terus tergurat sepanjang perbatasan. Membayangkan perbatasan adalah membayangkan raut wajah ibunya. Baginya perbatasan adalah ibunya. Karena itu, hasratnya tak pernah surut untuk pergi ke Motaain (perbatasan) apa pun rintang-halangnya. Pada sisi lain, ia telah memilih Ibu Pertiwi sebagai negaranya. Imajinasi Carlos malang melintang antara Ibu Kandung yang sakit-sakitan di Timor Leste dan Ibu Pertiwi yang seakan menjanjikan bulan dan bintang kepadanya.

B. KAJIAN TEORITIK

Semiotika Perspektif Roland Barthes

Teori yang digunakan dalam analisis film ini adalah semiotika. Istilah *‘semiotik’* berasal dari bahasa Yunani, *semeion* yang berarti “tanda”. Semiotika berusaha menjelaskan jalinan tanda atau ilmu tentang tanda; secara sistematis menjelaskan esensi, ciri-ciri, dan bentuk suatu tanda, serta proses signifikasi yang menyertainya (Sobur, 2009:16-17). Dalam perspektif semiotika, semua gejala hanyalah penampakan makna tertentu di baliknya.

Istilah semiotik diperkenalkan oleh Hippocrates (1460-337 SM), penemu ilmu medis Barat. Ilmu yang berkecimpung dalam membaca gejala-gejala. Mulanya semiotik berusaha membahas apa yang direpresentasikan oleh gejala atau tanda, bagaimana ia mewujudkan, mengapa dia mengindikasikan penyakit atau kondisi tertentu. Tanda sebuah balon yang menyala. Artinya, ide cemerlang. Ada korelasi antara citra mental dan objek yang menjadi tanda.

Hal yang dirujuk oleh tanda (balon) disebut referen (objek-petanda). Ada dua jenis referen. (1) referen konkret, seperti binatang (tikus, kucing, cecak). (2) referen abstrak berupa konsep seperti ide cemerlang yang merujuk pada bola lampu yang menyala. Dalam kepustakaan ilmu sosial, hampir sebagian besar menyebutkan bahwa ilmu semiotik bermula dari ilmu linguistik dengan tokohnya Ferdinand de Saussure (1857 - 1913). Dua tokoh utama yang memelopori semiotika sebagai teori adalah Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Ferdinand de Saussure (1857-1913) adalah pengembang bidang ini di Eropa, dia memperkenalkan istilah semiology. Sedangkan Charles Sanders Peirce (1839-1914) mengembangkannya di Amerika dengan menggunakan istilah semiotik. Kedua tokoh inilah yang membawa pengaruh besar dalam memahami dan menganalisis sebuah disiplin dengan menggunakan pendekatan semiotik.

Roland Barthes adalah seorang intelektual Perancis. Ia dikenal juga sebagai kritikus sastra Prancis yang ternama. Barthes konsisten menerapkan strukturalisme dan semiotika pada studi sastra. Ia dikenal sebagai salah seorang pemikir strukturalis yang rajin mempraktikkan

model linguistik dan semiologi Saussurean. Sebagaimana Saussure, Barthes memandang bahasa sebagai sebuah sistem tanda yang mencerminkan asumsi – asumsi dari satu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. Barthes mengajukan pandangan ini dalam *Writing Degree Zero* (1953, terj. Inggris 1951), dan *Critical Essay* (1964, terj. Inggris 1972), (Sobur, 2009:63). Dalam setiap esainya, Barthes banyak menghabiskan waktu untuk menguraikan serta menunjukkan konotasi yang terkandung dalam mitologi – mitologi yang biasanya merupakan hasil konstruksi yang cermat.

Barthes berupaya untuk mengeksplisitkan kode – kode narasi yang berlaku dalam suatu naskah realis. Lima kode yang ditinjau Barthes adalah kode hermeneutik (kode teka-teki), kode semik (makna konotatif), kode simbolik, kode proaretik (logika tindakan), dan kode gnomik atau kode kultural yang membangkitkan pengetahuan tertentu (Sobur, 2009:65).

Kode hermeneutik mengacu pada harapan pembaca mendapatkan “kebenaran” bagi pertanyaan yang muncul dalam teks. Kode semik menawarkan banyak sisi dalam proses pembacaan, dalam menyusun tema atau teks. Kode simbolik merupakan aspek pengkodean fiksi yang paling khas bersifat struktural atau pascastruktural. Kode proaretik adalah pelengkap utama teks yang dibaca orang, artinya semua teks bersifat naratif. Kode gnomik merupakan acuan teks ke benda – benda yang sudah diketahui dan dikodifikasi oleh budaya (Sobur, 2009:65-66).

Salah satu area penting yang dirambah Barthes dalam studinya tentang tanda adalah peran pembaca (*the reader*). Konotasi, walaupun merupakan sifat asli tanda, membutuhkan keaktifan pembaca agar dapat berfungsi. Barthes mengulas apa yang sering disebut sebagai sistem pemaknaan level kedua, yang dibangun di atas sistem lain yang telah ada sebelumnya. Sistem kedua ini oleh Barthes disebut dengan konotatif, yang dalam *Mythologies*-nya secara tegas ia bedakan dari denotatif atau sistem pemaknaan tataran pertama (Sobur, 2009:68-69).

Tabel 1. Peta tanda roland barthes

1. Signifier (Penanda)	2. Signified (Petanda)
3. Denotative Sign (Tanda Denotatif)	
4. CONNOTATIVE SIGNIFIER (PENANDA KONOTATIF)	5. CONNOTATIVE SIGNIFIED (PETANDA KONOTATIF)
6. CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF)	

Sumber : Sobur, 2009. *Semiotika Komunikasi*, hlm. 69

Peta Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas penanda (1) dan petanda (2) Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda denotatif adalah juga penanda konotatif (4) Jadi, dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan namun

mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya.

Secara rinci dapat diterangkan bahwa linguistik pada dasarnya membedakan tingkat ekspresi (E) dan tingkat isi (C) yang keduanya dihubungkan oleh sebuah relasi (R). Kesatuan dari Ekspresi dan Relasinya membentuk sebuah sistem (ERC). Sistem demikian ini dapat menjadi unsur sederhana dan sebuah sitem kedua akan menjadi luas.

Tabel 2. Dua sudut artikulasi barthes

1. Denotasi Metabahasa

E		C
E	C	

2. Denotasi Objek Bahasa

E	C	
	E	C

Sumber: Sobur Alex, 2009 : 70. *Semiotika Komunikasi*, hlm.70

Terdapat perbedaan antara denotasi dan konotasi dalam pengertian secara umum serta denotasi dan konotasi yang dimengerti oleh Barthes. Dalam pengertian umum, denotasi biasanya dipahami sebagai makna harafiah, makna yang sesungguhnya, bahkan kadang kala juga dirancukan dengan referensi atau acuan. Proses signifikasi yang secara tradisional disebut sebagai denotasi ini biasanya mengacu kepada penggunaan bahasa dengan arti yang sesuai dengan apa yang terucap. Dalam hal ini,



denotasi merupakan sistem signifikasi tingkat pertama, sementara konotasi merupakan tingkat kedua.

Denotasi justru lebih diasosiasikan dengan ketertutupan makna. Sedangkan konotasi identik dengan operasi ideologi, yang disebut Barthes sebagai “mitos”, dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai – nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu (Sobur,2009:70-71). Menurutnya, mitos berada pada wilayah pertandaan tingkat kedua atau tingkat konotasi bahasa dan konotasi itu dijadikan olehnya sebagai denotasi mitos dan mitos ini mempunyai konotasi

terhadap ideologi tertentu. Konotasi merupakan aspek bentuk bahasa dan mitos adalah muatannya. Barthes mengatakan, penggunaan konotasi dalam teks sebagai penciptaan mitos.

Teori Barthes tentang mitos ini memungkinkan pembaca untuk mengkaji ideologi secara sinkronik maupun diakronik. Secara sinkronik, makna terbentuk pada suatu titik sejarah dan seolah berhenti di titik tersebut. Sementara diakronik analisis Barthes memungkinkan untuk melihat kapan, di mana, dan dalam lingkungan apa sebuah sistem mitos digunakan. Tanda denotatif menurut Barthes terdiri dari penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*). Pada saat yang bersamaan tanda denotatif juga merupakan penanda konotatif. Jadi, menurut Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan. Namun, mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya.

C. PEMBAHASAN

Alenia Pictures merupakan salah satu rumah produksi di Indonesia yang didirikan oleh suami-istri, Ari Sihale dan Nia Zulkarnaen Desember 2004. Film perdana yang diproduksi melalui Alenia Pictures (AP) adalah “*Denias, Senandung di Atas Awan.*” Film ini demikian ramai ditanggapi dunia internasional karena aspek lokalitasnya yang begitu kuat dan tipikalistik. Film ini sukses menembus persaingan di film Indonesia pada tahun 2008 untuk mewakili Indonesia di ajang Piala Oscar. Selain film tersebut, terdapat beberapa judul film yang juga diproduksi oleh rumah produksi ini yakni “*Liburan Seru*”(2008), “*King*” (2009), “*Tanah Air Beta*” (2010), “*Serdadu Kumbang*”(2011), “*Di Timur Matahari*”(2012), “*Leher Angsa*”(2013).

Film TAB dirilis 17 Juni tahun 2010 berdurasi 95 menit. Film ini diadopsi dari sebuah novel karya Armantono. TAB dibuatkan sebagai skenario dan disutradari oleh Ari Sihale. Penata musik Aksan Sjaman dan Titi Rajo Bintang. Film TAB melibatkan aktor-aktor terkenal seperti Alexandra Gottardo sebagai Tatiana, Lukman Sardi sebagai Lukman, Asrul Dahlan sebagai Abu Bakar, Yehuda Rumbindi sebagai Carlo Gomez, Ari Sihale sebagai Dr. Joseph, Robby Tumewu sebagai Ko Ipin, Tessa Kaunang sebagai Ci Irene, Griffith Patricia sebagai Merry, Marcel Raymond sebagai Mauro, Martalita Nadia sebagai Merry Kecil.

Film merupakan salah satu media massa yang berusaha menyampaikan pesan melalui lakuan (lakon). Lakuan yang dapat ditonton dan suara yang didengar. Film mampu bercerita banyak dalam waktu singkat. Karena sifatnya yang lakuan dan audio visual (gambar dan suara yang hidup), maka film begitu dekat dengan pemirsa dan dalam jumlah yang sangat banyak. Juga, ; paling mudah mendapatkan pesan etis dan profetis yang disampaikan dalam bentuk lakuan. Ketika menonton film, penonton seakan – akan dapat menembus ruang dan waktu yang

dapat menceritakan kehidupan. Realitas sosial demikian dekat dengan realitas layar (film).

Film TAB mengisahkan situasi yang terjadi pascareferendum 1999. TAB memperlihatkan keadaan masyarakat yang terpaksa meninggalkan tanah air dan sanak saudaranya. Prosesi pengungsian kemanusiaan yang menyedihkan. Digambarkan dengan apik dan detail kehidupan para pengungsi di tenda darurat dan ruang terbuka yang penuh penderitaan. Lebih dalam dari itu, film TAB mempersoalkan tarik-menarik rasa cinta terhadap Ibu Kandung dan rasa cinta terhadap Ibu Pertiwi (Indonesia). Perang saudara telah mendesak mereka pada labirin lembah kemanusiaan yang begitu kelam. Keadaan itu direpresentasi dalam sebuah keluarga kecil yang harus berpisah dengan anak laki – lakinya yang tinggal bersama paman di Timor Leste. Sedangkan, sang ibu bersama sang adik tinggal di kamp pengungsian. Segala usaha serta semangat sang ibu untuk bertemu sang anak laki – laki terus dilakukan hingga pada akhirnya sang adik pun memberanikan diri pergi mencari sang kakak hingga perbatasan. Di bawah ini akan dianalisis secara semiotik gambar adegan (*scene*).



Situasi pengungsi berjejal berjalan menuju kamp pengungsi. Mereka membawa barang seadanya dan membawa beban batin yang sangat berat kala berpisah dengan sanak saudaranya. Demi Ibu Pertiwi meninggalkan Ibu Kandung.

Adegan di atas secara denotasi menggambarkan, keadaan pengungsi bersesakan berjalan melewati perbatasan menuju kamp pengungsian. Di bawah terik mata hari Timor yang menyengat, dan hati yang perih, para pengungsi mengarungi keadaan, membawa barang bawaan seadanya berjalan beriringan. Ibu – ibu bertelanjang kaki menapaki panasnya aspal dan jalan berbatu menggendong anak mereka. Tampak kamp pengungsian begitu sederhana, beratap daun, berlantai tanah, dan ukuran sangat kecil. Itulah gambaran denotasi adegan di atas.

Secara konotatif, gambar adegan di atas bermakna, peperangan selalu menyengsarakan rakyat yang tidak bersalah. Penderitaan karena meninggalkan harta benda di kampung halaman. Lebih dari itu, penderitaan oleh karena

meninggalkan sanak saudara. Perang justru memutuskan hubungan keluarga. Meski demikian, perpisahan dua negara tidak serta memisahkan hubungan keluarga. Persaudaraan adalah suatu ikatan yang ada secara lahiriah tidak dapat dipisahkan oleh apa pun. Oleh karena itu, baik berada pada negara yang berbeda tetapi hal tersebut bukanlah sebagai penghalang tali persaudaraan.

Apa yang dimitoskan oleh adegan di atas ialah bahwa perang selalu mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat banyak. Perang membawa petaka kemanusiaan, menghancurkan, terutama wanita dan anak-anak. Dalam adegan di atas terlihat sejumlah pengungsi ditampilkan Ari Sihalasle adalah anak-anak dan perempuan. Egoisme politik yang mendatangkan perang hanya menjerumuskan rakyat yang tidak bersalah. Rakyat tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka adalah korban politik dua negara dan memutuskan tali persaudaraan di antara masyarakat yang pro integrasi dan pro Indonesia. Kecintaan terhadap Indonesia dimitoskan melalui bendera merah putih yang dikibarkan pada tiang kamp.

Lihat gambar scene dua di bawah ini. Ibu Tatiana sedang mengajar anak sekolah di bawah atap sederhana dengan keadaan sekolah yang memprihatinkan. Secara denotatif seorang ibu guru (Tatiana) di sekolah darurat mengajarkan anak-anak pengungsi. Pada *scene* ini mengafirmasi suasana kelas yang beratapkan daun gawang dan ber dinding kayu yang hanya pada satu sisi sebagai penyangga papan tulis ini terdengar sedang menyanyikan sebuah lagu nasional. Ibu guru, Tatiana mengajarkan lagu Indonesia Pusaka. Lagu tersebut dikumandangkan di siang terik secara bersama – sama oleh semua murid di sekolah darurat tersebut. Murid – murid yang juga adalah anak – anak pengungsi yang bersekolah dengan keadaan seadanya. Mereka begitu antusias mendengar pelajaran dari ibu guru.

Konotasi apa yang tersirat di balik gambar scene di atas? Dalam *scene* ini dikisahkan Ibu Tatiana bersama muridnya menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Lagu yang berkonotasi bentuk kecintaan terhadap negara Indonesia (nasionalisme). Hal ini digambarkan secara jelas pada adegan ketika Ibu Tatiana mengajarkan lagu Indonesia Pusaka. Ungkapan kecintaannya terhadap Indonesia disampaikan secara terang – terangan. Apa pun keadaan atau penderitaan yang mereka alami, mereka tetap memilih Indonesia sebagai negaranya.

Mitos atau ideologi apa yang hendak diungkapkan melalui adegan di atas? Apa pun keadaan, Indonesia adalah harga mati. Dalam keadaan apa pun (penderitaan) kecintaan terhadap negara menjadi hal sangat penting. Karena itu, nasionalisme harus dibangun sejak anak duduk di Sekolah Dasar. Sekolah merupakan lembaga yang paling generik untuk menaburkan benih cinta negara. Salah satu menuju jalan cinta negara ialah mengajarkan lagu-lagu nasional. Dengan demikian, anak-anak belajar mencintai negara dan kelak mampu mengabdikan dan membela negara yang dicintainya.

Dalam gambar scene tiga secara denotasi memperlihatkan Carlo dan Merry yang sedang memberi hormat kepada bendera merah putih. Hal ini harus dilakukan keduanya sebagai hukuman karena telah membuat suasana kelas yang sedang berdoa sebagai bentuk berakhirnya kelas hari itu, menjadi gaduh. Keduanya dengan posisi tubuh tegap dengan posisi kepala yang terangkat memandangi bendera merah putih yang sedang berkibar di halaman sekolah darurat, sembari terus memberi hormat walaupun hari telah sore. Disalami oleh murid – murid lain yang pulang, Ibu Tatiana tetap memperhatikan kedua tingkah kedua muridnya tersebut.



Scene di atas secara denotative menerangkan, meskipun usia mereka masih kecil, namun mereka cinta terhadap Indonesia. Apa pun keadaannya, rumah reyot, kehidupan memprihatinkan atau kesulitan hidup yang lainnya. Artinya, cinta akan tanah air (NKRI) tidak hanya dimiliki oleh orang dewasa saja, tetapi juga anak kecil. Inilah tindakan kecil bernuansa nasionalisme. Merry dan Carlo yakni memberi hormat kepada bendera merah putih. Kecintaan terhadap Indonesia ditunjukkan secara terang-terangan.

Mitos yang dibangun dengan adegan atau gambar di atas ialah bahwa siapa pun dan dalam keadaan apa pun harus mencintai negara dalam setiap tindakannya. Dengan demikian, setiap warga negara diajarkan untuk mencintai negaranya sehingga ia kelak loyal dan berani membela negaranya.

Representasi rasa cinta negara tidak hanya dalam bentuk ikon seperti bendera, lagu kebangsaan atau simbol lainnya, tetapi juga dalam bentuk lain, seperti penulisan kata tertentu di tembok jalan umum atau di tempat yang berpotensi dapat dibaca oleh masyarakat luas. Gambar adegan di bawah memperlihatkan tulisan pada sebuah tembok.

Scene di atas secara deonotatif menerangkan salah satu sudut jalan yang terdapat coretan yang bertuliskan NKRI HARGA MATI!!!. Tulisan dengan desain sederhana yang dicat dengan warna merah disertai bendera merah putih yang terus berkibar yang terikat pada sebuah batang bambu. Tulisan ini ditulis dengan ukuran agak besar, sehingga dapat dilihat walaupun dari jarak agak jauh.

Secara konotatif, tulisan NKRI HARGA MATI!!! Dapat diartikan sebagai bentuk loyalitas dan kecintaan kepada negara Indonesia yang ditunjukkan secara vulgar melalui coretan ini. Selain itu juga, menunjukkan cara mereka membela tanah air, di mana mereka harus terpisah dengan sanak saudaranya demi mempertahankan Indonesia sebagai negara pilihan. Sedangkan mitos yang hendak dibangun dengan gambar adegan di atas ialah Indonesia adalah sebuah negara merdeka. Karena negara mana pun yang berusaha mengintervensi akan dilawan sampai titik darah penghabisan. Tulisan NKRI harga mati representasi kecintaan warga negara Indonesia terhadap NKRI.

D. SIMPULAN

Film Tanah Air Beta merupakan sebuah film layar lebar yang menceritakan tentang kondisi masyarakat pascareferendum tahun 1999, baik kondisi fisik maupun kondisi batin. Cerita tersebut sesungguhnya dijalin sangat apik antara tokoh-tokoh yang berdiri ditepian antara rasa cinta negara kesatuan Republik Indonesia dan rasa cinta keluarga. Film ini membangun konflik batin bagaimana Merry terjebak dalam kerinduan bertemu dengan ibunya yang masih berada di Timor. Sedangkan dia berada di wilayah Indonesia. Ide nasionalisme digambarkan melalui adegan dan simbol – simbol tertentu.

Apa yang hendak dikonotasikan dalam TAB adalah bahwa peperangan selalu membawa penderitaan bagi masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak yang justru tidak bersalah. Mitos muncul melalui pemaknaan atau penafsiran mendalam terhadap kode – kode sinematik (*setting*, gerakan kamera), tata bahasa film (jarak dan sudut pengambilan gambar), dan aspek tematis (dialog yang diucapkan antar tokoh).

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinaro, dkk. 2007. *Komunikasi Massa : Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- Bungin, H. M. Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta : Kencana.
- Cangara, Hafied. 2008. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Onong Uchjana. 1986. *Dimensi – Dimensi Komunikasi*. Bandung : Rosda Karya.
- 1992. *Dinamika Komunikasi*. Bandung : Rosda Karya.
- 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Graeme, Burton. 2007. *Membincang Televisi Sebuah Pengantar kepada Studi Televisi*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Kansil, C.S.T, dan Julianto. 1993. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Khairil, Sefryana. 2010. *Tanah Air Beta*. Jakarta: Gradien Mediatama.
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kusnadi, Wawan. 1996. *Komunikasi Massa : Sebuah Analisis Media Televisi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Liliweri, Alo. 2011. *Komunikasi : Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana.
- Littlejohn, W Stephen. 2011. *Teori Komunikasi*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Dedy. 2007. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Noviani. 2002. *Jalan Tengah Memahami Iklan, Antara Realitas, Representasi, dan Simulasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sobur, Alex. 2001. *Analisis Teks Media : Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- 2009. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sumarno, Marselli. 1966. *Dasar-Dasar Apresiasi Film*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Sobur, Alex. 2004. *Semiotika Komunikasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- 2006. *Analisis Teks Media : Suatu Pengantar untuk analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis Framing*. Edisi Keempat. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.



KEKERASAN BERBASIS GENDER: TELAAH TEORITIS “KAWIN TANGKAP” DALAM BUDAYA SUMBA (NTT)

Guidora Julianta Kopong
Jurusan Sosiologi, FKIP, Undana
guidiorakopong@gmail.com

ABSTRACT

Cultural violence is one of the violence based on culture. This type of violence uses culture as an excuse for conducting violence against women. This study aims to examine culture as one of the reasons to exercise violence against women as in “kawin tangkap” that happened in Sumba. Literature review is used in this study to explore the source of cultural violence such as patriarchy. The theory used in this study is by John Galtung, where he categorizes violence into three parts, they are physical violence, structural violence and cultural violence. Indonesia protects the rights to exercise and develop one’s culture. However neglecting women’s rights in an imbalance power relation within an ethnical or cultural group is not justified. Violence on the basis of culture is harmful to women and it is everyone’s responsibility to stop and to strive to end cultural violence.

Keywords: *culture, violence, women*

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Kemajemukan sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai kurang lebih 13.667 pulau, dengan berbagai suku dan subsuku bangsa. Masyarakat Indonesia juga memeluk berbagai agama resmi pemerintah seperti Islam, Hindu, Kristen, dan kepercayaan lokal seperti Sunda Wiwitan dalam suku Sunda, Marapu di Pulau Sumba, Jingitui di Pulau Sabu. Keanekaragaman suku, budaya, dan agama diakui oleh pemerintah lewat semboyan negara yakni Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu). Para pendiri bangsa menyadarikan keragaman masyarakat Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menegaskan, Indonesia dibangun atas dasar keberagaman dan bukan keseragaman. Artinya negara mengakui perbedaan yang dilihat sebagai realitas hidup masyarakat dan berupaya untuk memelihara kesatuan.

Bagaimana dua sisi mata uang, budaya bisa menjadi sumber pembebasan atau dominasi bagi anggota masyarakat yang minor seperti perempuan. Budaya yang mendominasi perempuan menindas perempuan seperti “kawin tangkap” yang terjadi di Sumba. Namun, disisi lain budaya menjadi pembebas bagi perempuan. Contohnya konsep Ambu, Nyi Pohaci, dan Pikukuh yang mengatur keseimbangan dan mampu menetralkan kekuasaan laki-laki dalam masyarakat Urang Kajeroan Baduy di Kanekes, Banten. Budaya yang menjadi pembebas perempuan juga terlihat dalam ritual *Mapag Dewi Sri* jelang musim panen di Komunitas Adat Banceuy Kabupaten Subang, Jawa Barat (Rohmana, 2014:152). Tradisi maupun budaya yang masih dilestarikan hingga kini di beberapa daerah di Indonesia terbukti netral dan menghormati kedudukan perempuan

dalam masyarakat. Tradisi juga diciptakan untuk mengakui eksistensi dan peran perempuan. Terlepas dari tradisi yang memberi penghargaan kepada perempuan, harus diakui masih banyak tradisi dan budaya yang menjadi pencetus kekerasan terhadap perempuan. Kondisi ini masih terkait dengan kedudukan dan posisi laki-laki dalam masyarakat.

Pada umumnya masyarakat Indonesia menganut sistem patrilineal, yang menempatkan garis keturunan laki-laki sebagai penerus keturunan. Dalam masyarakat yang menganut sistem ini, budaya patriarki pun tumbuh subur. Alfian Rokhmansyah dalam Sakina dan Siti (2017: 71), mendefinisikan patriarki sebagai sebuah konstruksi yang memposisikan laki-laki sebagai penguasa sentral. Relasi kuasa yang lebih dominan dikuasai oleh laki-laki, tidak jarang mengakibatkan kesenjangan, ketidakadilan gender, dan kekerasan terhadap perempuan. Relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan menjadi penyebab kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan pun beragam bentuknya, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomis. Contoh-contoh dari beberapa bentuk kekerasan di atas adalah sterilisasi paksa, pelecehan seksual di tempat kerja dan lembaga pendidikan, pemerkosaan, sampai kekerasan berbasis tradisi seperti kawin paksa atau kawin tangkap yang beberapa waktu lalu sempat marak di Sumba. Kutipan dari Rekomendasi Umum 19 CEDAW (Komnas Perempuan, 2011:12) menjelaskan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan adalah kekerasan yang ditujukan pada perempuan karena ia perempuan, atau kekerasan yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Di dalamnya tercakup tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental, seksual atau

penderitaan, ancaman tindakan semacam itu, koersi, dan bentuk-bentuk perampasan kebebasan lainnya.

Setiap tanggal 25 November hingga 10 Desember, dunia dan Indonesia memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Peringatan hari anti kekerasan terhadap perempuan ini dimaksudkan untuk mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, menjamin perlindungan bagi penyintas kekerasan, dan menyadarkan masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM. Bertepatan dengan perayaan Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan, tulisan ini ingin mengingatkan bahwa praktik budaya yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan masih dilestarikan hingga sekarang. Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji budaya yang menjadi legitimasi penindasan terhadap perempuan. Praktik “kawin tangkap” yang masih hidup di Sumba serta pemberian belis yang memicu kekerasan terhadap perempuan mencerminkan perempuan sebagai anggota masyarakat rentan terhadap praktik yang mengatasnamakan budaya. Menjadi kewajiban bersama untuk tetap melestarikan budaya dan tradisi yang merupakan identitas bersama. Namun pengabaian hak-hak khususnya anggota komunitas masyarakat budaya yang tidak memiliki kuasa dan penindasan yang tidak kasat mata patut dikritisi.

B. METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menghimpun informasi yang berkaitan dengan topik yang menjadi objek penelitian. Informasi diperoleh dari buku, karya ilmiah, disertasi, jurnal *online*, dan sebagainya. Uraian-uraian yang dihipun berkaitan dengan budaya dan dan contoh budaya yang menjadi legitimasi kekerasan terhadap perempuan. Uraian juga membahas teori kekerasan kultural yang dicetus oleh John Galtung dan Susan Okin yang mengkritik pendekatan yang dianjurkan Kymlica bahwa dalam masyarakat yang multikultur pemberian hak-hak istimewa wajib dilakukan kepada kelompok minoritas etnis untuk menentukan diri sendiri.

C. LANDASAN TEORI

John Galtung merupakan salah satu pemikir hebat yang terkenal akan tulisannya mengenai perdamaian dan kekerasan. Kajian Galtung terkait kekerasan dan perdamaian dijadikan rujukan bagi para akademisi, pengambil kebijakan, pekerja LSM, dll. Galtung, dalam Eriyanti (2017:29) mendefinisikan kekerasan sebagai berikut.

“Singkatnya, kekerasan adalah setiap kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural atau spiritual, juga perilaku, sikap, kebijakan atau kondisi yang melemahkan, mendominasi atau menghancurkan diri kita sendiri dan orang lain”

Galtung juga menambahkan untuk mencegah kekerasan, identifikasi sumber kekerasan mutlak diperlukan. Kekerasan mempunyai banyak bentuk mulai dari

kekerasan menggunakan fisik, seperti penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan seksual, juga pemukulan. Galtung dalam Ramadhan (2017:84), menjelaskan tiga bentuk kekerasan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Kekerasan langsung merujuk pada tindakan penyerangan secara fisik. Kekerasan struktural tidak membunuh secara langsung dan tidak memiliki aktor individual, namun kekerasan lewat struktur sosial menyebabkan kemiskinan, ketidakseimbangan ekonomi, ketidakadilan sosial maupun politik. Sedangkan kekerasan kultural merujuk pada praktik-praktik kebudayaan, bahasa, seni, agama, ideologi, pengetahuan empiris, dan pengetahuan formal yang dapat digunakan untuk membenarkan atau melegitimasi kekerasan langsung dan struktural.

Galtung dalam Eriyanti (2017: 29), lebih lanjut menjelaskan patriarki menjadi akar permasalahan dari kekerasan langsung, struktural, dan kultural. Patriarki memisahkan peran publik dan privat, yang menjelaskan peran publik diakui sementara peran dalam ranah privat diabaikan. Selain itu, patriarki juga membentuk relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, baik itu di tempat kerja maupun dalam rumah tangga. Tidak hanya itu tubuh perempuan pun menjadi objek penindasan dari kekuasaan laki-laki. Galtung menambahkan bahwa penindasan yang terjadi kepada perempuan merupakan refleksi nyata kontrol laki-laki atas perempuan dalam relasi kuasa yang tidak seimbang.

Bagi Galtung dalam Eriyanti (2017:31), untuk menghapuskan kekerasan berbasis gender maka perlu membangun dan meningkatkan empati laki-laki dengan menerapkan pola sosialisasi yang selama ini digunakan dalam mengasuh perempuan. Membesarkan anak laki-laki dengan pola asuh yang diterapkan pada anak perempuan menurut Galtung mampu mengurangi kekerasan. Sisi feminim yang selama ini hanya diasah pada anak perempuan juga harus dimiliki oleh anak laki-laki. Selain itu, ibu juga mempunyai peran penting dalam memastikan anak laki-laki memiliki sifat humanis.

D. PEMBAHASAN

Kehidupan masyarakat yang keberagaman suku dan budaya memiliki dinamika yang cukup unik. Pengakuan atas perbedaan budaya mulai diterima masyarakat dan pemerintah. Salah satunya ada perjuangan panjang terkait pengosongan kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemeluk aliran kepercayaan. Perjuangan ini mendapat respon pemerintah. Melalui Mahkamah Konstitusi (MK), pemerintah meninjau ulang Undang-Undang No 23 Tahun 2006 dan mengabulkan permohonan untuk mengosongkan kolom agama pada KK dan KTP bagi pemeluk aliran kepercayaan. Mereka pun memperoleh hak terkait administrasi kependudukan. Penganut aliran kepercayaan memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan pemeluk agama resmi yang diakui pemerintah. Selain itu, Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga telah disahkan dengan tujuan

menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Dukungan dari pemerintah untuk melestarikan budaya sebagai identitas masyarakat yang majemuk, multikultur, dan multietnis selaras dengan pemikiran Kymlicka, seorang filsuf politik Kanada yang terkenal karena kajian multikulturalisme. Kymlicka (dalam Prabowo, hal. 5) menegaskan bahwa pengakuan terhadap minoritas dan kebebasan masyarakat dalam mengembangkan budaya tidak hanya sampai pada tingkat pemberian hak personal dan individual (misalkan tindakan afirmatif dan perlindungan HAM) tetapi lebih dari itu memberikan kebebasan mengekspresikan budaya tanpa harus mengganggu perekonomian dan penduduk mayoritas. Pada masyarakat multikultural, penghormatan perbedaan adalah kebutuhan sosial. Untuk melestarikan tradisi dan budaya tersebut, Kymlicka menyarankan pemberian hak-hak istimewa bagi kelompok minoritas baik itu etnis, budaya, dan bangsa untuk menentukan diri sendiri. Akan tetapi, pelestarian budaya dan tradisi tetap dikawal untuk memastikan komunitas budaya tidak mengabaikan hak dan kebutuhan anggota komunitas terlebih mereka yang tidak mempunyai kuasa seperti perempuan dan anak.

Salah satu kritik datang dari Susan Muller Okin, seorang feminis liberal yang mengkritisi pemikiran Kymlicka. Okin dalam Putranto (2013:19), paling tidak memberikan dua kritik terhadap pendekatan yang dianjurkan oleh Kymlicka. Menurut Susan, konsep multikulturalisme cenderung memandang kelompok budaya secara tunggal dan cenderung fokus pada perbedaan antar kelompok budaya dari pada perbedaan di dalam sebuah kelompok budaya/etnis. Pengabaian beragam perbedaan dalam kelompok budaya/etnis itu sendiri berpotensi melanggengkan kekerasan gender. Selain itu Okin juga melihat kebijakan hak-hak kelompok minoritas mengabaikan berbagai hal yang berkaitan dengan ranah privat (rumah tangga). Argumen yang mengatakan bahwa dengan mengembangkan kultur sendiri dan tercipta rasa percaya diri dan harga diri beserta hak akan penentuan diri yang membawa kelompok budaya/etnis menuju kepada kehidupan yang lebih baik dinilai pincang oleh Okin. Menurut Okin, ranah privat dalam hal ini rumah tangga menjadi tempat pengajaran, praktik, dan pewarisan budaya kepada anggota keluarga termasuk kaum muda. Distribusi kekuasaan dan tanggung jawab dalam ranah privat memberi dampak bagi siapa saja yang bisa berpartisipasi. Budaya yang mengharuskan perempuan tetap berkecimpung dalam dunia domestik memperkecil kemungkinan kesetaraan terwujud di berbagai bidang kehidupan.

Okin menjelaskan pemenuhan hak-hak kelompok etnis hendaknya tidak melupakan hak-hak dari bagian intra-kelompok. Beberapa anggota kelompok yang tidak memiliki kekuasaan seperti perempuan dan anak rentan akan kekerasan. Oleh sebab itu, pemenuhan hak-hak kelompok etnis juga harus memperhatikan hak-hak dari anggota kelompok masyarakat minoritas dengan memberikan rasa aman dan nyaman, menjamin

kesetaraan antar anggota kelompok, dan tidak mencederai atau mempraktikkan kekerasan terhadap anggota yang minoritas. Selain Okin, Bonnie Honig, seorang ahli politik dan feminis menyampaikan kekhawatirannya akan kekerasan yang terjadi dalam grup etnis/budaya dan budaya yang dijadikan basis kekerasan terhadap perempuan. Honig dalam tulisannya yang berjudul *My Culture Made Me Do It* (1999:36), menjelaskan “budaya” telah menjadi legitimasi pelanggaran hak asasi manusia dalam kelompok minoritas yang terjadi baik di Amerika Serikat maupun di Cina. Honig menambahkan ketika alasan “budaya” yang mengizinkan kami melakukan ini (kekerasan), para aktor sedang menunjukkan *privilege* atau hak istimewa yang mereka miliki untuk melakukan tindakan kekerasan yang bertentangan dengan hak perempuan yang juga merupakan hak asasi manusia. Kekerasan yang mengatasnamakan budaya merupakan realita sekaligus pembuktian Teori Kekerasan Kultural dari Galtung yang sebelumnya menjelaskan bahwa kekerasan datang dalam berbagai bentuk yaitu kekerasan fisik, struktural, dan kultural.

Beberapa contoh penindasan yang mengatasnamakan budaya terhadap perempuan terjadi dalam komunitas, seperti sunat klitoris perempuan di Pantai Gading atau praktik pemaksaan bagi perempuan untuk menikah laki-laki yang memperkosanya yang ditemukan di beberapa negara di Asia. Praktik ini dimaksudkan untuk memulihkan kehormatan keluarga dan sebagai kompensasi karena perempuan korban pemerkosaan tidak layak untuk dinikahi lagi oleh siapa pun. Di Indonesia ditemukan beberapa bentuk kekerasan atas nama budaya yang mencetus kekerasan terhadap perempuan, salah satunya adalah “kawin tangkap” di Sumba. Pada tahun 2020, tersebar beberapa video yang demikian viral di media sosial terkait penangkapan perempuan yang ditangkap di tempat umum dan digendong oleh beberapa laki-laki. Perempuan yang ditangkap kemudian menangis sambil digotong dan sempat mengadakan perlawanan. Reaksi pun lantas muncul setelah insiden kawin tangkap yang terjadi di beberapa kabupaten di Sumba.

Pendeta David Maundimadari Gereja Kristen Sumba (GKS) menjelaskan bahwa “kawintangkap” adalah budaya Sumba. Akan tetapi pelaksanaannya sesuai dengan ajaran Marapu dan tidak dilakukan sembarangan. Pemaksaan perkawinan tidak akan dilakukan jika tidak mendapat restu dari pihak Marapu dan caranya pun tentu berbeda dengan yang dilakukan pada video yang sempat viral. David merujuk pada kajian yang dilakukan oleh Antropolog, Oe H Kapita yang menulis buku tentang “Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya”. David menjelaskan bahwa Kapita menulis tentang carapeminangan dalam masyarakat Sumba yaitu *pitimarangganggu* (ambil dalam perjumpaan) dan *pitirambang* (ambil paksa) yang dikenal sebagai “kawin tangkap”. Proses “tangkap” pun sudah direncanakan dan disetujui oleh keluarga kedua belah pihak. Penanda informasi adat, seperti kuda yang diikat dan emas yang ditaruh di bawah bantal juga sudah

dipersiapkan sebagai tanda bahwa proses sedang berlangsung. David

menegaskan praktik *pitimarang* dan *pitirambang* dilakukan dengan mengikuti aturan

(<https://www.voaindonesia.com/a/apa-yang-salah-dari-tradisi-kawin-tangkap-di-sumba-/5494289.html>).

Frans Wora Hebi sebagai pemerhati budaya Sumba juga menegaskan kepada iNews Sore (04/07/2020), bahwa “kawin tangkap” bukanlah tradisi Sumba dan Frans tidak setuju dengan penangkapan perempuan di area publik. Menurut Frans, baiknya para tetua adat berkumpul dan membuat peraturan serta memberikan sanksi bagi para pelaku “kawin tangkap,” ([youtube.com/watch?v=v1lqurQ39Yg](https://www.youtube.com/watch?v=v1lqurQ39Yg)). Hal senada juga diungkapkan Ketua Sinode Kristen Sumba, Alfred Samani yang menjelaskan bahwa budaya dimanfaatkan sebagai pembenaran tindakan premanisme. Pemerintah 4 kabupaten di Sumba bersama tokoh agama, tokoh adat, dan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak telah menandatangani kesepakatan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumba dan “kawin tangkap” tidak lagi dipaksakan kepada perempuan Sumba ([youtube.com/watch?v=pL3LCCPLjkk](https://www.youtube.com/watch?v=pL3LCCPLjkk)).

Pendeta David Maundina mengutip Antropolog Oe H Kapita menekankan, beberapa tahap pernikahan dalam budaya Sumba mengenal adanya “kawin tangkap” yang disebut dengan *piti rambang*. Akan tetapi pelaksanaan tahap ini tidak melalui pemaksaan seperti yang terlihat dalam video yang beredar. Jelas terlihat adanya pergeseran pemahaman dan tradisi sehingga “kawin tangkap” yang seharusnya dilakukan dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku sudah melenceng jauh dari aturan dan makna sesungguhnya. Hal ini juga yang menyebabkan Ketua Sinode Kristen Sumba, Alfred Samani menjelaskan “budaya” dijadikan alasan untuk melakukan pemaksaan dan penangkapan terhadap perempuan.

Selain praktik “kawin tangkap” di Sumba, pemberian belis juga mempunyai kompleksitas masalah terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Belis merupakan salah satu syarat penting dalam perkawinan dalam adat Flores yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan kedua keluarga. Namun, bagi sebagian laki-laki, pembayaran belis yang lunas menjadi dasar untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap pasangan. Belis yang menjadi symbol penghormatan tinggi bagi perempuan telah mengalami pergeseran makna. Penelitian dari Divisi Perempuan dari Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) mengungkapkan salah satu pemicu kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di NTT adalah belis. TRUK-F juga merincikan jumlah korban yang disebabkan oleh belis, sebanyak 5 orang pada tahun 2015, 11 orang di tahun 2013, dan sebanyak 9 orang di tahun 2012 (Samuel dalam Seba, 2016: 73).

Kedua contoh praktik budaya yang berimplikasi pada kekerasan terhadap perempuan merupakan potret kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Praktik budaya yang terus dilestarikan membuktikan budaya

selain menjadi pembebas juga dapat menjadi penindas perempuan. Netralitas budaya kemudian dipertanyakan. Budaya yang senantiasa dinamis, apakah dapat menjadi netral dan adil baik terhadap perempuan dan laki-laki. Kedua insiden “kawin tangkap” maupun belis juga mencerminkan kurang pemahamannya masyarakat akan budaya beserta makna yang menjurus pada pergeseran budaya.

Menanggapi praktik “kawin tangkap” yang terjadi di Sumba, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melakukan siaran pers Komnas Perempuan atas praktik “kawin tangkap” di Sumba dan menegaskan perlu adanya langkah-langkah tepat dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan yang mengatasnamakan tradisi dan budaya. Praktik pemaksaan perkawinan merupakan bentuk diskriminasi berbasis gender. Dalam masyarakat yang menganut paham patriarki, perempuan berada dalam posisi subordinat sehingga persetujuan dari perempuan akan perkawinan diabaikan.

Komnas Perempuan (2020:3), juga menyampaikan undang-undang menjamin hak masyarakat tradisional dan identitas budaya mereka. Akan tetapi, budaya dijadikan pembenaran kekerasan terhadap perempuan. Penyelewengan dan pergeseran nilai-nilai budaya pun terjadi. Untuk mencegah terjadinya “kawin tangkap” Komnas Perempuan mengajak setiap elemen masyarakat, termasuk pemerintah provinsi NTT, kepolisian, masyarakat adat untuk membuka ruang dialog dan mendengar suara perempuan, termasuk korban “kawin tangkap”. Selain membuka ruang dialog investigasi terhadap praktik kawin tangkap perlu dilakukan untuk melihat akar masalah dan dampak yang ditimbulkan. Komnas Perempuan juga mengajak pemerintah provinsi dan DPRD NTT untuk mengambil langkah-langkah komprehensif yang tidak terbatas pada penyusunan peraturan dan kebijakan guna mencegah praktik “kawin tangkap”. Pelayanan dan pemulihan korban yang berkualitas dan dapat diakses oleh korban “kawin tangkap” juga harus disediakan, sambil memberi pendidikan publik untuk mendorong kesetaraan gender. Media massa juga diajak untuk melakukan pemantauan dan pemberitaan terkait “kawin tangkap” untuk penyadaran publik.

Mencegah kekerasan kultural terjadi lagi, Okin dalam Putranto (2013:20) menganjurkan pemberian hak-hak kultural kepada kelompok minoritas perlu mengkaji lebih dalam ketidakadilan yang terjadi dalam kelompok. Misalkan, perlu dilihat lebih jeli lagi relasi ketidakadilan antara jenis kelamin yang berbeda karena ketidakadilan tersebut sifatnya privat dan tersamar. Terkait kebijakan, Okin menekankan kebijakan yang menjadi dasar hidup dari kelompok budaya/etnis harus mengkritisi apakah kebijakan tersebut sudah mengakomodir kepentingan dari anggota kelompok budaya/etnis yang kurang mempunyai kuasa dan suara. Misalkan apakah suara dari perempuan-perempuan muda dalam kelompok etnis/budaya sudah diakomodir oleh kelompok budaya mereka. Okin berpendapat kaum perempuan yang sudah tua cenderung dikooptasi oleh tetua kelompok yang pada umumnya

laki-laki sehingga mereka tetap melestarikan ketidaksetaraan dalam kelompok.

Komnas Perempuan telah menyuarkan pemerintah, segenap stakeholder, tetua adat, toko agama untuk bekerjasama mengakhiri dan menentang kekerasan terhadap perempuan yang dilandasi oleh budaya yang telah mengalami pergeseran makna. Pemahaman yang minim akan budaya nyatanya telah berujung pada kekerasan. Okin menyarankan pemberian hak-hak kultural dalam kebebasan menjalankan tradisi dan budaya tetap dikawal dan hak-hak kelompok minoritas dalam grup etnis maupun budaya hendaknya menjadi perhatian seluruh anggota kelompok. Relasi kuasa yang tidak seimbang di antara anggota kelompok memicu ketidakadilan khususnya bagi mereka yang minoritas. Kearifan lokal, tradisi, budaya apapun namanya, seharusnya menjadi dasar hidup yang memanusiakan manusia. Kritik terhadap budaya yang dinamis dan senantiasa berubah-ubah hendaknya selalu dilakukan untuk mengedepankan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan menjamin hak-hak perempuan untuk tidak menjadi objek dan korban kekerasan.

E. KESIMPULAN

25 November hingga 10 Desember setiap tahun diperingati sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Pada momen ini keberhasilan, tantangan, dan upaya terus-menerus untuk meminimalisir dan mencegah kekerasan terhadap perempuan diperingati dan disuarakan. Kekerasan masih terus menghantui perempuan termasuk kekerasan yang berkedok budaya. “Kawin tangkap” di Sumba, pemberian belis yang mempunyai nilai meluhurkan perempuan pada praktiknya seperti api jauh dari panggang. Oleh karena itu kekerasan berkedok budaya dan “budaya” yang dilegitimasi untuk melakukan kekerasan tidak dapat ditolerir dan dibiarkan. Pelestarian budaya dalam komunitas etnis maupun budaya hendaknya tidak saja memperhatikan dan memperjuangkan hak hak kolektif komunitas melainkan juga melihat lebih jeli persoalan-persoalan yang dalam komunitas seperti relasi kuasa antar satu kelompok dengan kelompok yang lain, khususnya persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan di ranah privat yang sering tak kasat mata.

F. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Eriyanti, LD, 2017. *Pemikiran John Galtung Tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme: Jurnal Hubungan Internasional*, Vol.6, Edisi 1, <http://doi.org/10.18196/hi.61102>, diakses pada tanggal 1 November 2020
- Honig, B 1999. *My Culture Made Me Do It: Is Multiculturalism Bad For Women?* Hal 35-40, Princeton University Press, Princeton
- Prabowo S, N. *Kewarganegaraan Multikultural (Pembelaan Will Kymlicka atas Hak-Hak Minoritas Bangsa dan Etnis)*, Edisi 4, No. 7, <https://jurnalrasailstebi.almuhsin.ac.id/jurnal/Edi>

si4/7.%20M.%20Nur%20Prabowo%20S.pdf, diakses pada tanggal 30 November 2020

- Putranto, H. 2013. *Kesetaraan Jender dan Multikulturalisme Sebuah Catatan dan Refleksi untuk Konteks Indonesia: Jurnal Ultima Humaniora*, Vol. 2, No. 1, Hal. 11-27, diakses di <https://adoc.pub/kesetaraan-jender-dan-multikulturalisme.html>, pada tanggal 1 Desember 2020
- Ramadhan, FB, 2017. “Kekerasan itu Katarsis dari Patriarki”: *Resistensi pada Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Praktik Gerakan Sosial Aliansi Laki-Laki Baru*, Antropologi Indonesia, No. 2, <https://doi.org/10.7454/ai.v38i2.8773>, diakses pada tanggal 29 November 2020.
- Rohmana M, J. A, 2014. *Perempuan dan Kearifan Lokal: Performativitas Perempuan dalam Ritual AdatSunda*, Vol. 13. No. 2, <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.132.151-166>, diakses pada tanggal 30 November 2020.
- Sakina, AI dan Siti A, DH. 2017. *Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia: Social Work Jurnal*. Vol. 7, No. 1, Hal. 72-80, <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13820>, diakses tanggal 29 November 2020.
- Seba, R. 2016, *Kekerasan Terhadap Perempuan Bagian dari Pergeseran Nilai Budaya Belis di Flores Nusa Tenggara Timur dalam Indonesia yang Berkeadilan Sosial Tanpa Diskriminasi*, <http://repository.ut.ac.id/7985/>, diakses tanggal 29 November 2020.

Sumber Internet

- Apa yang Salah dari Tradisi “Kawin Tangkap” di Sumba, 8 Juli 2020 (<https://www.voaindonesia.com/a/apa-yang-salah-dari-tradisi-kawin-tangkap-di-sumba-5494289.html>, diakses tanggal 29 November 2020.
- Pernikahan Identik dengan Cinta, di NTT Aksi Kawin Tangkap Resahkan Perempuan, i-News Sore, 04 Juli 2020 ([youtube.com/watch?v=pL3LCCPLjkk](https://www.youtube.com/watch?v=pL3LCCPLjkk)) diakses tanggal 29 November 2020.
- Siaran Pers Komnas Perempuan atas Praktik Kawin Tangkap di Sumba: *Hentikan Praktik Kekerasan Terhadap Perempuan yang Mengatasnamakan Tradisi*, Jakarta 24 Juni 2020, www.komnasperempuan.go.id, diakses pada tanggal 28 November 2020

Optimisme

Jurnal bahasa, Sastra, dan Budaya



**PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
FKIP UNDANA**